



## **PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI**

### **PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 15 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2006-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TEBING TINGGI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI**

**dan**

**WALIKOTA TEBING TINGGI**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2006-2025.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang terdiri dari Walikota Tebing Tinggi sebagai Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi.
6. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD, adalah Dokumen Perencanaan untuk Periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2025.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJMD I Tahun 2006-2010, RPJMD II Tahun 2011-2015, RPJMD III Tahun 2016-2020, dan RPJMD IV Tahun 2021-2025.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.

**BAB II**  
**PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**  
**Pasal 2**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025 memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

**Pasal 3**

- (1) Program Pembangunan Daerah periode 2006-2025 dilaksanakan mengacu kepada upaya pencapaian visi dan misi RPJP Daerah.
- (2) Visi RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah "Kota Jasa dan Perdagangan dengan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas".
- (3) Misi RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mewujudkan pemerintah kota yang bersih dan berwibawa;
  - b. mewujudkan perekonomian kota yang tangguh;
  - c. mewujudkan masyarakat kota yang sehat, cerdas dan bermartabat; dan
  - d. mewujudkan sarana dan prasarana kota yang modern dan asri.

**Pasal 4**

- (1) RPJP Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi.
- (3) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi, dan Program Kepala Daerah.
- (4) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Daerah Provinsi.

### **Pasal 5**

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepala Daerah yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun pertama periode Pemerintahan Kepala Daerah berikutnya.

### **BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 6**

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

### **BAB IV PERUBAHAN Pasal 7**

- (1) RPJP Daerah Tahun 2006-2025 dapat diubah dalam hal:
  - a. terjadi perubahan yang mendasar; dan
  - b. merugikan kepentingan nasional dan daerah.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### **BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 8**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 7 November 2011

**WALIKOTA TEBING TINGGI,**

ttd.

**UMAR ZUNAI DI HASIBUAN**

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 7 November 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH,**

ttd.

**HADI WINARNO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2011 NOMOR 15**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

  
Syaprin Efendi Harahap



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 15 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH  
KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2006-2025**

**I. UMUM**

RPJP Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025 sudah ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 sebelum RPJP Nasional maupun RPJP Daerah Provinsi ditetapkan. Penetapan RPJP Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025 dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi penyusunan RPJM Daerah Tahun 2006-2010 mengingat bahwa Tahun 2005 Kota Tebing Tinggi memiliki kepala daerah baru terpilih yang mengharuskan daerah memiliki RPJM Daerah periode 2006-2010 yang muatannya merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan bahwa RPJP Daerah yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJP Nasional paling lambat 1 (satu) Tahun sejak diundangkan. Sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RPJP Daerah Kota Tebing Tinggi disesuaikan dengan RPJP Nasional Tahun 2005-2025, baik substansi maupun jangka waktunya. Dengan demikian masa berlaku RPJP Daerah Kota Tebing Tinggi juga mengikuti masa berlaku RPJP Nasional sehingga menjadi RPJP Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025. Penyesuaian RPJP Daerah Kota Tebing Tinggi dengan RPJP Nasional tetap didasarkan atas karakteristik dan potensi daerah serta prosesnya melibatkan partisipasi *stake holder* melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbangda).

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Untuk tercapainya visi dan misi RPJP Daerah maka program pembangunan daerah periode 2006-2025 disamping sebagai penjabaran visi dan misi RPJM Daerah juga merupakan upaya pencapaian visi dan misi RPJD Daerah.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan RKPD dan RAPBD Tahun pertama adalah RKPD dan RAPBD Tahun 2011, 2016, 2021, dan 2026.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 12**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI**  
**NOMOR 15 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH**  
**KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2006-2025**

## BAB I PENDAHULUAN

### I.1 LATAR BELAKANG

Cita-cita Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan Tujuan Nasional Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Untuk mencapai cita-cita Nasional dan Tujuan Nasional tersebut Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Pusat telah banyak berupaya untuk dapat sampai kepada cita-cita dan Tujuan Nasional tersebut. Sejak awal kemerdekaan telah beberapa kali dikeluarkan kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maupun sistem dan metode Perencanaan Pembangunan Daerah. Sampai akhirnya pada tahun 2004 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Ketiga produk Undang-undang tersebut merupakan penyempurnaan terhadap Undang-undang dan peraturan lainnya yang terkait dengan Pemerintahan Daerah dan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun ke depan. Berdasarkan amanat Undang-undang tersebut, maka Pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi menyusun RPJPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025 ini.

Kebutuhan penting penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025 adalah untuk mengantisipasi berbagai perubahan lingkungan strategik, baik yang bersifat internal maupun eksternal dalam 20 tahun ke depan.

Oleh karena itu, perencanaan jangka panjang yang disusun bersifat makro dan strategik, dengan materi pokok yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang kota, serta merupakan satu kesatuan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025, dan rencana pembangunan jangka panjang Sumatera Utara tahun 2005-2025.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025, diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan kota sebagai bagian integral dari tujuan pembangunan nasional dalam jangka panjang. Untuk itu, pengalaman pembangunan kota, khususnya dalam 5 (lima) tahun terakhir merupakan pembelajaran pembangunan kota yang sangat berharga untuk menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan kota dalam 20 tahun ke depan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tebing Tinggi tahun 2006- 2025 disusun secara aspiratif, sehingga selaras dengan potensi, masalah dan tantangan pembangunan kota 20 tahun ke depan. Oleh karena itu, di samping melalui proses teknokratik, RPJP Kota Tebing Tinggi juga disepakati melalui forum konsultasi publik yang diantaranya melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJP Kota Tebing Tinggi, yang diikuti seluruh stakeholder pembangunan kota, untuk kemudian ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi.

## **I.2 PENGERTIAN RPJP DAERAH**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disingkat RPJPD adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun ke depan. Dokumen ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 tahun. Dokumen RPJP Daerah ini bersifat makro memuat visi, misi, tujuan dan arah pembangunan daerah yang disusun melalui pendekatan partisipatif yaitu melibatkan seluruh unsur stakeholder.

## **I.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan dan penetapan RPJP Kota Tebing Tinggi tahun 2006-2025 dimaksudkan untuk menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Tebing Tinggi tahun 2006-2010, sekaligus menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) tahun 2006-2010, di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Berdasarkan latar belakang, dan maksud penyusunannya, maka tujuan umumnya adalah:

1. Sebagai instrumen koordinasi efektif antar pelaku pembangunan kota;
2. Meningkatkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintah Kota, maupun antar Pusat dan Propinsi dengan Kota Tebing Tinggi dan antar Pemerintah Kota-Swasta-Masyarakat;
3. Meningkatkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian pembangunan kota;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkesinambungan;
5. Meningkatkan optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia, sekaligus mendorong kapasitas sektor swasta dan masyarakat, dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya swasta dan masyarakat secara bertanggung jawab.

Dengan demikian, RPJP Kota Tebing Tinggi tahun 2006-2025, memiliki kedudukan strategik sebagai acuan bagi seluruh komponen pembangunan kota, (Pemerintah-DPRD-Masyarakat-Swasta) untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan kota sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan kota yang ditetapkan secara bersama.

## **I.4 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN**

Landasan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ/2005 tentang Penyusunan Dokumen RPJP dan RPJM Daerah.

#### **I.5 HUBUNGAN RPJPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA**

Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa "RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional". Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, maka RPJPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025 ini mengacu pada RPJP Nasional.

Selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan "RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif". Berdasarkan aturan tersebut, maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025 ini merupakan landasan bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), serta perencanaan-perencanaan Daerah Kota Tebing Tinggi lainnya.

#### **I.6 PENDEKATAN PROSES PENYUSUNAN**

Proses perencanaan yang dilakukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2006- 2025 ini dilakukan melalui beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Teknokratik; Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh Lembaga dan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tebing Tinggi yang secara fungsional bertugas dan terkait dengan sistem perencanaan pembangunan daerah di Kota Tebing Tinggi.

2. Pendekatan Partisipatif; Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan masyarakat atau pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan Kota Tebing Tinggi. Keterlibatan *stakeholders* ini guna menjangkau aspirasi dan menciptakan rasa saling memiliki.
3. Pendekatan *Bottom-Up* dan *Top-Down*; Perencanaan dengan pendekatan *bottom-up* dan *top-down* dilakukan melalui aliran proses dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah dalam hirarki pemerintahan. Pendekatan *bottom-up* dan *top-down* adalah untuk menyelaraskan antara kebutuhan dari Pemerintah Bawahan (Kabupaten/Kota) dengan program dari Pemerintah Atasan (Propinsi dan Pusat).
4. Pendekatan Politik; Perencanaan dengan pendekatan politik dilakukan melalui pembahasan akhir antara Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan pihak DPRD Kota Tebing Tinggi guna mendapatkan kesepakatan politis dan sekaligus menjadi sebuah produk perundangan-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Kota Tebing Tinggi.

## **1.7 SISTIMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJPD Kota Tebing Tinggi, maksud dan tujuan penyusunan, landasan penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, pola pikir penyusunan dan sistematika penulisan.

### **BAB II : Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umum Kota Tebing Tinggi**

Bab ini berisi menguraikan gambaran umum kondisi Kota Tebing Tinggi saat ini dengan maksud mengetahui keadaan daerah Kota Tebing Tinggi pada berbagai bidang dan aspek kehidupan sosial ekonomi dan yang akan diproyeksikan dalam jangka waktu 20 tahun ke depan termasuk potensi dan faktor stratejik yang dimiliki.

### **BAB III : Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Kota Tebing Tinggi**

Bab ini berisi visi, misi, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025.

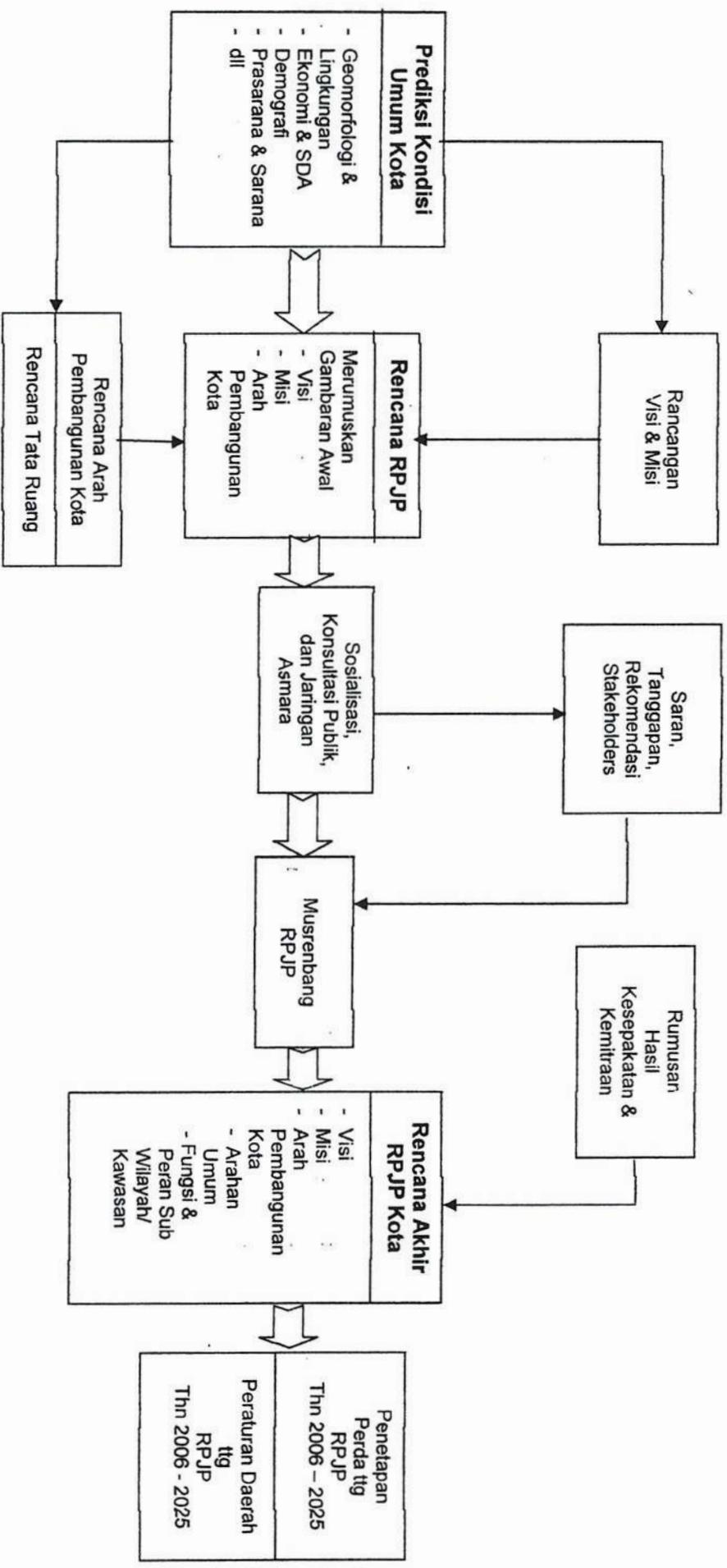
### **BAB IV : Arah dan Tahapan Pembangunan Jangka Panjang**

Berisi pokok-pokok kebijakan pembangunan kota dalam 20 tahun ke depan, dalam rangka: (1) Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang akuntabel, demokratis dan berlandaskan hukum guna melindungi kepentingan masyarakat di atas kemajemukan menuju masyarakat madani yang sejahtera, (2) Mewujudkan perekonomian kota yang tangguh, (3) Mewujudkan masyarakat kota yang sehat, cerdas dan bermartabat dan (4) Mewujudkan sarana dan prasarana kota yang modern dan asri. Bab ini juga membahas tahapan dan prioritas yang akan dilakukan pada masing-masing RPJMD.

### **BAB V : Penutup**

Berisi komitmen yang dibangun diantara seluruh stakeholder untuk mengimplementasikan RPJP Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025, secara efektif dan efisien.

### Skema Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025



## BAB II KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM KOTA TEBING TINGGI

### II.1 KONDISI SAAT INI

Pembangunan Kota Tebing Tinggi yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup. Di samping banyak kemajuan yang telah dicapai, masih banyak pula tantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Untuk itu, masih diperlukan upaya mengatasinya dalam pembangunan nasional 20 tahun ke depan.

Pembangunan Kota Tebing Tinggi dalam 20 tahun ke depan juga akan menghadapi masalah dan tantangan yang harus diantisipasi, seperti kecenderungan regionalisasi dan globalisasi ekonomi, tuntutan distribusi pembangunan kota yang lebih merata, tuntutan tata pemerintahan yang baik, harapan masyarakat untuk menjadikan Kota Tebing Tinggi yang maju dan modern dengan kemiskinan yang rendah, berkontribusi mempertahankan persatuan dan kesatuan berdasarkan wawasan nusantara serta ketahanan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan harapan untuk dapat mengejar ketertinggalan dari kota-kota yang telah lebih dahulu maju secara regional maupun internasional.

#### A. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

1. Berdasarkan Sensus Penduduk (SP) Tahun 2000, penduduk Kota Tebing Tinggi berjumlah 125.078 jiwa, yang terdiri dari 61.874 jiwa penduduk laki-laki dan 63.204 jiwa penduduk perempuan dengan *sex ratio* sebesar 97,89. Sedangkan menurut hasil P4B Tahun 2003 (Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan), penduduk Kota Tebing Tinggi menjadi 132.760 jiwa naik sebesar 6 % selama kurun waktu 3 tahun. Selanjutnya jumlah penduduk pada tahun 2004 menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menjadi 134.976 jiwa, mengalami kenaikan sebesar 1,7 % pertahun dengan kepadatan penduduk sebesar 3.512 jiwa/Km<sup>2</sup>.
2. Berdasarkan SP periode 1990-2000, besarnya angka pertumbuhan penduduk Kota Tebing Tinggi adalah 0,71 % per tahun. Angka ini merupakan angka pertumbuhan terendah di antara 6 (enam) daerah kota di Sumatera Utara. Selanjutnya, pertumbuhan penduduk periode tahun 2000-2004, naik menjadi 2,22 % per tahun.
3. Struktur penduduk Kota Tebing Tinggi berbentuk piramid, dimana konsentrasi penduduk berada pada usia antara 0-4 s/d usia 30-34 tahun. Struktur penduduk bentuk ini, dalam 5-10 tahun ke depan akan membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana serta ketersediaan lapangan kerja. Selanjutnya jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) sebesar 65,15 %, dengan demikian Rasio Beban Ketergantungan sebesar 53,48 %, yang berarti bahwa setiap 100 penduduk produktif Kota Tebing Tinggi menanggung beban sekitar 53 penduduk yang tidak produktif.
4. Pada tahun 2004 mayoritas pekerja bekerja pada sektor tersier (76,67%) disusul sektor sekunder (19,90%) dan primer (3,43%). Transformasi lapangan pekerjaan di Kota Tebing Tinggi menunjukkan mengarah pada sektor *services* karena tingginya persentase pekerja yang bekerja pada sektor tersebut.

5. Penduduk miskin di Kota Tebing Tinggi tahun 2004 adalah sebanyak 26.268 orang. Tahun 2002 Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) Kota Tebing Tinggi sebesar 20,3. Kondisi ini lebih baik dibandingkan dengan tahun 1999 dimana nilai IKM sebesar 21,6. Dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sumatera Utara nilai IKM Kota Tebing Tinggi lebih rendah dari provinsi yaitu sebesar 24,5 tahun 1999 dan 24,8 tahun 2002. Upaya dilakukan oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk mengurangi kemiskinan penduduk Kota Tebing Tinggi adalah dengan program pengentasan kemiskinan (*poverty alleviating program*), seperti bantuan modal dan alat kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi, pemberian bantuan akses air bersih, lantainisasi rumah prasejahtera, pengobatan gratis, bantuan kepada jompo (lanjut usia) dan fakir miskin, dan lain-lain.
6. Pada tahun 2004 penduduk Kota Tebing Tinggi yang termasuk angkatan kerja sebanyak 59.176 orang. Namun kondisi perekonomian Kota Tebing Tinggi saat ini belum dapat menampung seluruh angkatan kerja tersebut dalam pasar tenaga kerja.  
Hal ini terlihat dari komposisi angkatan kerja di tahun 2004 dimana 43,78 % berstatus bekerja dan sisanya 10,85 % adalah penganggur.
7. Kinerja pemerataan memperoleh pendidikan dasar di Kota Tebing Tinggi Tahun Pelajaran (TP) 2004/2005 dapat diketahui melalui indikator rata-rata Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Melanjutkan (AM). Dengan mempergunakan APK, APM dan AM tersebut diketahui kinerja pemerataan memperoleh pendidikan di Kota Tebing Tinggi. APK Kota Tebing Tinggi adalah sebesar 105,82 untuk tingkat SD, 124,64 untuk tingkat SLTP dan 175,08 untuk tingkat SM (Sekolah Menengah). Sedangkan APM Kota Tebing Tinggi adalah sebesar 88,17 untuk tingkat SD, sebesar 92,37 untuk tingkat SLTP dan 127,67 untuk tingkat SM. Dari data APK dan APM tersebut menunjukkan bahwa APK dan APM tertinggi adalah untuk tingkat SM. Tingginya APK untuk tingkat SM karena banyak siswa dari luar Kota Tebing Tinggi yang melanjutkan pendidikan SM di Kota Tebing Tinggi, seperti dari Kuala Tanjung, Tanjung Kasau, Sei Baman dan perkebunan sekitar Kota Tebing Tinggi. Sedangkan tingginya APM untuk tingkat SM menunjukkan bahwa pada SM usia sekolah yang bersekolah lebih banyak dibandingkan tingkat SD dan SLTP.
8. Selanjutnya, jika dilihat berdasarkan Angka Melanjutkan (AM) terlihat bahwa AM untuk tingkat SLTP (132,12) lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat SM (85,40). Hal ini karena perbandingan jumlah sekolah tingkat SLTP dan SD lebih tinggi (3,21) dibandingkan perbandingan sekolah tingkat SM dan SLTP (0,83). Kemudian dari AM menunjukkan bahwa semua siswa SD/MI di Kota Tebing Tinggi melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTP/MTs dan juga ditambah siswa dari daerah lain. Namun, terdapat 1 hingga 2 orang dari 10 lulusan SLTP/MTs tersebut yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SM/MA. Kondisi ini cukup memperhatikan karena bagi mereka pada usia produktif dan tidak bersekolah ini, yaitu usia di atas 15 tahun tersebut harus masuk ke pasar tenaga kerja atau jadi pengangguran.
9. Di bidang Kesehatan, Pemerintah Kota TebingTinggi telah mengupayakan peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui berbagai program pelayanan Kesehatan masyarakat, melakukan pengawasan obat dan makanan serta program perbaikan gizi.  
Indikasi keberhasilannya tergambar dari jumlah keluarga yang menggunakan jamban, meningkatnya *Universal Child Immunization* (UCI) tingkat Kelurahan, turunnya keluhan kesehatan dan kasus DBD, meningkatnya Gizi masyarakat, menurunnya prevalensi berat badan bayi lahir rendah, menurunnya jumlah balita kurang gizi dan berkurangnya prevalensi ibu hamil kurang energi kronis (KEK)

serta meningkatnya jumlah peserta aktif Keluarga Berencana. Angka Kesakitan (*morbidity rate*) warga Tebing Tinggi dalam kurun waktu 2003-2006 yang banyak diderita seperti: batuk 5,72 %, pilek 6,38 % dan panas 4,43 %. Indikator atas penolongan bayi bisa dijadikan dalam melihat tingkat kesehatan masyarakat dan dari data susenas 2006 sudah sebagian besar penolong persalinan adalah dokter dan bidan, dimana 96,33 % kelahiran bayi ditolong oleh bidan dan 3,26 % ditolong Dokter, serta 0,46 ditolong tenaga medis. Sementara tingkat kematian bayi (*infant mortality rate*) tahun 2006 adalah 8 perseribu kelahiran, dari angka tersebut maka terjadi penurunan angka kematian bayi selama kurun waktu 1990-2006. Selanjutnya usia harapan hidup (*life expectancy*) menurut hasil perhitungan tahun 2004 adalah sebesar 70,1 dan pada tahun 2005 naik menjadi 70,3. Hal ini terjadi karena makin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan makin baiknya kondisi sosial ekonomi yang memungkinkan perbaikan gizi serta kesehatan lingkungan masyarakat.

10. Iklim politik Kota Tebing Tinggi sampai saat ini cukup kondusif. Bila politik lokal diletakkan dalam konteks kebijakan publik, maka di samping institusi pembuat kebijakan resmi (*official policy-maker*) seperti Pemerintah Kota (birokrasi), DPRD dan institusi di bidang yudisial dan penegakan hukum, di Kota Tebing Tinggi juga masih terdapat *unofficial policy-maker* seperti kelompok-kelompok kepentingan (Pers, LSM, Ormas, Kelompok Profesi) serta figur-figur warga (*citizen*) yang berpotensi serta memiliki akses terhadap pembuatan kebijakan lokal. Dalam proses perencanaan pembangunan, secara prosedural Pemerintah Kota turut melibatkan kelompok-kelompok masyarakat ini dalam mengartikulasikan program pembangunan yang berlandaskan kebutuhan warga. Dalam proses implementasi, kelompok-kelompok ini pulalah yang menjadi *social controller* terhadap pelaksanaan program dan proyek pembangunan.

Namun, dalam proses evaluasi program, peran tersebut jauh menurun disebabkan kurangnya pemahaman tentang mekanisme pertanggungjawaban publik yang terukur (*measurables*). Kondisi ini menyebabkan konstelasi politik di Kota Tebing Tinggi masih didominasi kekuatan tradisional dari elit eksekutif dan sebahagian anggota DPRD (*legislative*). Sejak model pemilihan langsung diperkenalkan, baik pada Pemilu Legislatif 2004, Pilpres 2004, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2005 maupun pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2008, iklim politik di Kota Tebing Tinggi cukup kondusif dan jauh dari fenomena kekerasan dan anarkisme. Geografis Tebing Tinggi yang tidak terlalu luas turut memudahkan terjalinnya koordinasi dan komunikasi politik antara kekuatan-kekuatan politik, penyelenggara pemilu, pihak keamanan maupun dengan warga. Potensi konflik tidak sampai menyebar menjadi konflik yang luas, karena masih terdapat budaya malu bila salah satu pihak diklaim menjadi biang keributan. Begitupun, iklim kondusif ini tidak dibarengi dengan tingkat partisipasi politik warga yang stabil, bahkan memperlihatkan kecenderungan terus menurun. Pada Pemilu legislatif 5 April 2004, tingkat partisipasi warga pemilih mencapai 72%, namun menurun pada penyelenggaraan Pilpres I sebesar 69%, Pilpres Tahap II 67%, Pemilihan Walikota/Wakil Walikota tahun 2005 sebesar 68%, dan antiklimaksnya pada Pilgubsu tahun 2008 dimana tingkat Partisipasi pemilih hanya mencapai 60%. Kejenuhan warga akibat terlalu seringnya warga ke TPS merupakan salah satu sebab menurunnya tingkat partisipasi warga (*terjadi desakralisasi pemilu*).

11. Kondisi keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas pada tahun 2005 secara umum masih ditandai oleh tingginya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai akibat kondisi perekonomian negara yang belum sepenuhnya pulih dari krisis berkepanjangan. Tindak pidana konvensional dengan skala lokal seperti pencurian, penipuan, perampokan, kekerasan rumah tangga, pembunuhan atau kejahatan susila yang merupakan karakteristik cerminan

kondisi perekonomian, intensitasnya masih cukup tinggi dan semakin bervariasi, data jenis kejahatan dan pelanggaran yang dilaporkan dari tahun ke tahun makin meningkat. Permasalahan kecil yang disertai dengan emosi yang tinggi dapat berubah menjadi tindak kriminal berupa penganiayaan ringan, berat, atau bahkan sampai dengan tindak pembunuhan.

Fenomena ini muncul tidak hanya di kota-kota besar, tetapi sudah merambah kota-kota kecil bahkan di pelosok desa. Selanjutnya, adanya kemudahan memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, khususnya informasi bernuansa konsumerisme yang kurang mengedepankan aspek moralitas, apabila dihadapkan pada kesulitan hidup masyarakat, maka akan memicu meningkatnya tindak kriminal.

12. Di Kota Tebing Tinggi komposisi penduduknya terdiri dari 6 agama besar (Islam, Kristen, Katolik, Budha dan Hindu serta Sikh). Kompleksitas tersebut juga dibarengi dengan komunitas masyarakat adat yang membentuk perkumpulan-perkumpulan etnis, dengan tujuan melestarikan nilai-nilai adat sekaligus menjaga hubungan kekerabatan. Di Kota tebing Tinggi sendiri telah terbentuk Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dengan tujuan menjalin kerjasama, kesepahaman, serta toleransi antar umat beragama, yang sejauh ini memang sudah terjalin rukun dan damai. FKUB ini juga dibentuk agar kejadian-kejadian insidental yang berpotensi menimbulkan sentiment negative antar umat beragama dapat diselesaikan secara musyawarah, karena pada dasarnya umat beragama merupakan sumberdaya insan dalam pembangunan. Kondisi pluralitas warga bukanlah merupakan hambatan dalam pembangunan untuk kemajuan bersama, tetapi justru menjadi modal sosial dalam pembangunan

## **B. Ekonomi**

1. Pendapatan Regional yang biasa disebut dengan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu daerah. Selama kurun waktu tahun 2000-2004 pertumbuhan perekonomian Kota Tebing Tinggi menunjukkan kecenderungan meningkat rata-rata sebesar 8,1% pertahun (Atas Dasar Harga Berlaku).
2. PDRB perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB perkapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Selama kurun waktu 2001-2004 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) meningkat dari Rp. 5.512.632,- menjadi Rp. 6.248.169,-.
3. Struktur perekonomian Kota Tebing Tinggi dari tahun ke tahun didominasi oleh sektor perdagangan (22,19%), sektor jasa-jasa (21,58%) dan sektor industri (18,40%).
4. Sementara sektor pertanian memperlihatkan peranannya yang cenderung menurun selama kurun waktu tahun 2001-2004 yaitu dari 2,61% menjadi 2,25%.
5. Dilihat dari laju pertumbuhan, sektor lembaga keuangan, usaha persewaan dan jasa perusahaan mengalami laju pertumbuhan yang cukup pesat yaitu dari 16,86% pada tahun 2001 menjadi 26,28% di tahun 2004, diikuti oleh sektor utiliti (listrik, gas dan air minum) serta sektor perdagangan, hotel dan restoran.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tebing Tinggi mengalami peningkatan dari Rp. 33,8 milyar pada tahun 2001 menjadi Rp. 154,8 milyar pada tahun 2004. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dari Rp. 4,5 milyar menjadi Rp. 9,7 milyar pada periode yang sama.

7. Posisi dana simpanan selama periode 2000-2004 meningkat dari Rp. 991,9 juta menjadi Rp. 1,029 milyar sementara posisi kredit meningkat dari Rp. 204,1 juta menjadi Rp. 390,4 juta. Secara kumulatif, prosentasi kredit terhadap dana simpanan mengalami peningkatan dari 20,6% menjadi 37,9%.

### C. Sarana dan Prasarana

1. Kondisi panjang jalan Kota Tebing Tinggi adalah 190,23 km dan 34,4% atau 65,43 km diantaranya berada dalam kondisi rusak. Sementara bila dilihat dari tingkat pelayanan, terdapat ruas jalan yang kapasitasnya sudah tidak stabil sampai kepada kritis terutama Jl. Gatot Subroto, Jl. Yos Sudarso, Jl. M. Yamin dan Jl. Ahmad Yani. Di sisi lain, aspek manajemen lalu lintas memerlukan perhatian khusus utamanya dalam hal pengendalian, pemberian warning light dan segregasi arus lalu lintas.
2. Rute angkutan umum di Kota Tebing Tinggi sebanyak 23 rute dengan 553 armada. Umumnya, angkutan umum melayani pergerakan menuju jalan-jalan utama kota, yaitu dengan melayani pergerakan penduduk dari pusat-pusat permukiman menuju pusat kota dan kegiatan sosial dan ekonomi penduduk (pendidikan, tempat kerja, belanja, dan lain-lain).  
Kondisi terminal yang merupakan tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian lalu lintas juga merupakan bagian dari sistem transportasi dan bagian dari unsur tata ruang. Fungsi terminal Bandar Kajum saat ini masih perlu dioptimalkan utamanya untuk melayani external trip dari arah timur dan barat yang menuju kawasan kota. Hal ini memerlukan sub terminal sebagai simpul pergantian intermoda.
3. Masalah umum yang menyangkut angkutan umum perkotaan Tebing Tinggi saat ini mencakup: a) pelayanan angkutan umum yang perlu mengacu pada hirarki jalan serta dapat menjangkau daerah terpencil di wilayah pinggiran kota, fasilitas sosial, fasilitas pendidikan, kawasan permukiman dan perdagangan, serta b) peningkatan kualitas pelayanan dari angkutan umum termasuk jaminan keselamatan penumpang.
4. Pelayanan listrik yang mencakup seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kota Tebing Tinggi belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat akibat keterbatasan pasokan listrik PT. Perusahaan Listrik Negara. Sesuai dengan standar PU Cipta Karya, diperlukan kebutuhan listrik sebesar 180 watt/orang, 10% dari kebutuhan rumah tangga diperuntukkan untuk penerangan jalan umum dan taman serta 40% dari kebutuhan rumah tangga dialokasikan untuk fasilitas sosial dan industri.
5. Pelanggan air bersih PDAM Kota Tebing Tinggi sampai dengan saat ini mencapai 7.408 SR (Sambungan Rumah). Pelanggan air bersih PDAM Tirta Bulian selama kurun waktu tahun 2001-2003 mengalami peningkatan sekitar 6,93 %. Peningkatan jumlah pelanggan ini umumnya dari kelompok rumah, toko dan industri dan badan sosial dan rumah sakit. Tahun 2003 Air Minum disalurkan kepada konsumen sebanyak 1.959,4 ribu m<sup>3</sup>, naik sekitar 5,95 % dari tahun 2002 yang sebanyak 1.848,9 ribu m<sup>3</sup>. Sebanyak 1.384,6 ribu m<sup>3</sup> (70,66 %) disalurkan kepada konsumen rumah tangga, 14,08% dikonsumsi oleh perusahaan industri dan pertokoan, sementara badan sosial dan rumah sakit hanya menggunakan air bersih sebesar 7,32%, sedangkan instansi pemerintah menggunakan air bersih sebesar 155,3 ribu m<sup>3</sup> atau sekitar 7,94%. Di sisi lain, produksi air PDAM masih belum mampu sepenuhnya disalurkan ke pelanggan disebabkan penyebaran penduduk yang belum terpola dengan baik disamping kualitas peruntukan air sungai Padang yang diperkirakan tidak layak lagi dijadikan sumber air baku.

6. Seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk, kegiatan ekonomi dan kegiatan jasa lainnya menyebabkan meningkatnya produksi sampah di Kota Tebing Tinggi dari tahun ke tahun. Kondisi ini diperburuk dengan terbatasnya lahan kota yang dapat dijadikan sebagai Tempat Pembuangan Sampah sementara dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
7. Kondisi drainase Kota Tebing Tinggi saat ini masih belum terpisah antara saluran air kotor dengan saluran air hujan. Kondisi ini diperparah dengan adanya banjir yang datang secara rutin apabila air sungai Padang, Bahilang dan Sibarau meluap. Kondisi yang sering terjadi pada sungai Padang adalah sedimentasi yang cukup berat pada bagian badan sungai serta DAS dipenuhi oleh permukiman penduduk. Di sisi lain, sungai-sungai yang ada memiliki permasalahan diantaranya tanggul sungai yang sudah longsor, belum adanya talud, terjadinya 'back water' pada saat hujan besar serta sedimentasi di anak sungai Padang yang sangat berpotensi menyebabkan terjadinya banjir di Kota Tebing Tinggi.

#### **D. Wilayah dan Tata Ruang**

1. Pola penggunaan lahan di Kota Tebing Tinggi membentuk pola *concentric* (memusat), yaitu pola guna lahan dimana aktivitas kegiatan masyarakat dan kepadatan penggunaan lahan umumnya berada di daerah pusat kota (*urban area*). Selain itu, juga pola penggunaan lahan mengikuti pola pengembangan jaringan utilitas (jalan). Penggunaan lahan di kota Tebing Tinggi pada tahun 2003 adalah untuk kegiatan pemerintahan (41,83%) dan untuk kegiatan pertanian (40,91%).
2. Melihat lokasi strategisnya yang terletak pada dua jalur ekonomi, yaitu lintas timur dan lintas tengah Sumatera serta merupakan wilayah yang dikelilingi daerah perkebunan, maka penyediaan fasilitas pendukung untuk kegiatan perkotaan dan pelayanan publik (termasuk fasilitas pendidikan dan kesehatan) sudah harus diperhatikan ketersediaannya (*availability*) serta tingkat layanannya (*level of services*).
3. Pembangunan Kota Tebing Tinggi mempunyai konsep pengembangan pusat kota yang di lingkupi bangunan umum dengan skala layanan kota. Industri diarahkan ke bagian Timur, sedangkan bagian Utara secara konseptual diperuntukkan bagi Perkantoran Pemda dan perumahan pegawai, terminal penumpang, terminal barang dan kawasan pergudangan.  
Sedangkan wilayah pinggiran kota lainnya, yaitu bagian Timur, Selatan dan Barat ditetapkan sebagai kawasan cadangan kota dengan pemanfaatan sementara untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Selain kawasan cadangan juga wilayah Selatan dan Barat diarahkan sebagai wilayah resapan air melalui kebijaksanaan pengaturan kepadatan bangunan.
4. Secara administratif, Kota Tebing Tinggi saat ini telah berkembang menjadi 5 (lima) kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Padang Hulu, Kecamatan Rambutan, Kecamatan Padang Hilir, Kecamatan Tebing Tinggi Kota dan Kecamatan Bajenis. Kondisi ini menyebabkan diperlukannya sarana dan prasarana sosial utamanya bagi kecamatan yang belum memiliki sarana dan prasarana sosial seperti rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, rumah bersalin, sekolah dan sebagainya.
5. Sesuai dengan amanat UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang, Kota Tebing Tinggi sebagai salah satu kota dengan fungsi perdagangan, jasa dan permukiman, keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sangat diperlukan sebagai penyeimbang lingkungan ekologis kota.

## E. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Kota Tebing Tinggi merupakan salah satu pemerintah daerah dari 25 kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara yang berjarak sekitar 80 km dari Kota Medan (ibukota Propinsi Sumatera Utara) serta terletak pada lintas utama Sumatera, yaitu yang menghubungkan Lintas Timur dan Lintas Tengah Sumatera melalui Lintas Diagonal pada ruas jalan Tebing Tinggi-Pematangsiantar-Parapat-Balige-Siborong-borong.
2. Kota Tebing Tinggi terletak diantara  $3^{\circ} 16' 38,66''$  LU -  $3^{\circ} 22' 39,89''$  LU dan  $99^{\circ} 26' 56,35''$  BT -  $99^{\circ} 11' 32,96''$  BT dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara dengan PTPN III Kebun Rambutan, Kabupaten Serdang Bedagai.
  - Sebelah Selatan dengan PTPN IV Kebun Pabatu dan Perkebunan Paya Pinang, Kabupaten Serdang Bedagai.
  - Sebelah Timur dengan PT: Socfindo Tanah Besi dan PTPN III Kebun Rambutan, Kabupaten Serdang Bedagai.
  - Sebelah Barat dengan PTPN III Kebun Gunung Pamela, Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Berdasarkan letak geografisnya Kota Tebing Tinggi beriklim tropis. Ketinggian 26-34 meter DPL (diatas permukaan laut) dengan topografi mendatar dan bergelombang. Temperatur udara di kota ini cukup panas yaitu berkisar berkisar  $25^{\circ} - 27^{\circ}$  C. Sebagaimana kota di Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi mempunyai dua musim, penghujan dan kemarau dengan jumlah curah hujan sepanjang tahun rata-rata 1.776 mm/tahun dengan kelembaban udara 80%-90%.
4. Kota Tebing Tinggi adalah adalah satu dari tujuh kota yang ada di propinsi Sumatera Utara, yang berjarak sekitar 80 km dari Kota Medan. Kota Tebing Tinggi berada di bagian tengah Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, yang dibatasi oleh PTPN III Rambutan di sebelah Utara, PT, Socfindo Kebun Tanah Besih di sebelah Timur, PTPN III Kebun Pabatu di sebelah Selatan, dan PTPN III Kebun Gunung Pamela di sebelah Barat.
5. Kota Tebing Tinggi dilintasi oleh 5 sungai besar yaitu Sungai Padang, Sungai Bahilang, Sungai Kelembah, Sungai Sibarau, dan Sungai Bangauan, sebagai berikut dengan kondisi sebagai berikut:

• Sungai Padang	16.221,993 m
• Sungai Bahilang	4.272,073 m
• Sungai Sibarau	3.618,624 m
• Sungai Kelembah	6.373,101 m
• Sungai Sibangauan	3.781,612 m

Sei Padang merupakan sumber Air Baku yang diolah menjadi Air Bersih guna memenuhi kebutuhan air bersih yang dipergunakan untuk keperluan sosial, keperluan ekonomi dan keperluan masyarakat sesuai dengan standar baku mutu air yang berlaku.
6. Sumber pencemaran udara pada umumnya disebabkan oleh jenis kegiatan seperti industri pengolahan, transportasi, dan kegiatan keseharian rumah tangga. Di Kota Tebing Tinggi, terdapat berbagai jenis industri pengolahan yang berpotensi mencemari udara, namun sumber pencemaran yang cukup besar adalah yang berasal dari lalu lintas kendaraan bermotor. Dengan jumlah kendaraan bermotor di Kota Tebing Tinggi seperti kendaraan umum, total kendaraan diperkirakan mencapai 57.492 unit pada tahun 2005, beban pencemaran udara yang ditimbulkan cukup signifikan. Pencemaran udara yang

paling tinggi terdapat di ruas-ruas jalan yang paling padat lalu lintasnya dan rawan kemacetan.

Sumber pencemaran lain adalah yang berasal dari pembakaran limbah padat domestik/sampah oleh masyarakat, baik pembakaran secara terbuka maupun dengan menggunakan kompor atau alat masak.

7. Pemukiman liar dan kumuh merupakan masalah lingkungan yang belum bisa dihindari, karena semakin mahal dan terbatasnya lahan yang tersedia untuk pemukiman, sedangkan kemampuan masyarakat untuk memiliki lahan yang lebih layak masih terbatas. Pemukiman liar umumnya berlokasi di bantaran sungai dan rel kereta api. Sedangkan pemukiman kumuh yang tidak liar banyak dijumpai pada masyarakat yang berpenghasilan lebih baik, karena mereka mampu tinggal di kawasan pemukiman normal, hanya saja daya beli mereka tidak cukup baik, sehingga tidak mampu tinggal di kawasan yang lebih baik.

## II.2 TANTANGAN

### A. Sosial Budaya dan Kehidupan Agama

1. Kota Tebing Tinggi terdiri dari berbagai suku bangsa yang heterogen seperti Suku Melayu, Batak, Mandailing dan sebagainya ditambah dengan suku-suku pendatang seperti China, Jawa, Minang dan lain-lain yang dapat hidup berdampingan secara damai. Adat istiadat berbagai suku bangsa dan berbagai corak etnis adalah merupakan adat dan budaya yang dapat dipromosikan kepada wisatawan yang berkunjung ke daerah ini. Tantangan kebudayaan dalam 20 tahun mendatang adalah (1) mempertahankan adat dan budaya lokal, (2) mempertahankan situs dan lokasi bersejarah, serta (3) mempertahankan ciri Kota Tebing Tinggi sebagai bagian dari lintasan sejarah bangsa, dan (4) menjadikan Kota Tebing Tinggi sebagai pusat transit wisata belanja kuliner.
2. Secara sosial, salah satu tantangan terberat dalam pembangunan kota 20 tahun ke depan adalah terjadinya perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan budaya yang nampak pada kecenderungan sikap dan perilaku materialisme, individualisme, sekularisme, dan masalah-masalah sosial lainnya yang meningkat, sejalan dengan perkembangan Kota Tebing Tinggi yang maju dan arus globalisasi. Untuk itu perlu respon dan antisipasi sejak dini agar masyarakat dapat mempertahankan religiusitas yang ada selama ini.
3. Pembangunan yang dilakukan selama ini telah pula menimbulkan masalah sosial berupa tingginya pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan masyarakat, dan sebagainya. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) khususnya fakir miskin apabila tidak dilakukan secara tepat akan berakibat pada kesenjangan sosial yang semakin meluas, dan berdampak pada melemahnya ketahanan sosial masyarakat, serta dapat mendorong terjadinya konflik sosial, terutama dalam kelompok masyarakat.
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berupa pengukuran perbandingan dari harapan hidup , melek huruf , pendidikan dan standar hidup digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah wilayah termasuk ke dalam golongan rendah , golongan sedang/menengah atau golongan tinggi. Angka IPM Kota Tebing Tinggi tahun 2004 menunjukkan angka 47,23 yang masuk kategori rendah, meningkat menjadi 51,45 pada tahun 2005 dan naik lagi menjadi 52,88 pada tahun 2006. Dari angka IPM ini Kota Tebing Tinggi masih dalam kategori golongan sedang/menengah dan hal ini dapat berpengaruh terhadap kualitas hidup yang dapat mengakibatkan rendahnya produktivitas dan daya saing perekonomian. Pembangunan kesehatan dan pendidikan memiliki peranan penting dalam

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di bidang kesehatan tantangan pembangunan yang dihadapi, antara lain, adalah mengurangi kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan, tingkat sosial ekonomi, dan gender; meningkatkan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan yang kurang memadai; meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan; dan mengurangi beban ganda penyakit yaitu pola penyakit yang diderita oleh sebagian besar masyarakat adalah penyakit infeksi menular, namun pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular serta meningkatnya penyalahgunaan narkotik dan obat-obat terlarang.

5. Sementara itu, tantangan yang dihadapi pembangunan pendidikan adalah menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan jumlah proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, menurunkan jumlah penduduk yang buta aksara, serta menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup tinggi antar kelompok masyarakat, termasuk antara penduduk kaya dan penduduk miskin. Tantangan dalam pembangunan pendidikan lainnya adalah meningkatkan kualitas dan relevansi termasuk mengurangi kesenjangan mutu pendidikan sehingga pembangunan pendidikan dapat berperan dalam mendorong pembangunan secara menyeluruh termasuk dalam mengembangkan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia, kemampuan untuk hidup dalam masyarakat yang multikultur, serta meningkatkan daya saing. Pembangunan pendidikan ditantang untuk menyediakan pelayanan pendidikan sepanjang hayat.
6. Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar warga kota, yaitu hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan juga harus dipandang sebagai suatu investasi dalam kaitannya untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Meskipun kualitas kesehatan masyarakat Kota Tebing Tinggi telah meningkat, akan tetapi disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi masih ada. Persentase anak balita yang berstatus gizi kurang dan buruk terutama dari kelompok masyarakat miskin masih sering menjadi berita, begitu juga halnya dengan cakupan imunisasi pada golongan miskin adalah lebih rendah dari golongan kaya.
7. Pembangunan manusia pada intinya adalah pembangunan manusia seutuhnya. Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan agama adalah mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, mewujudkan kerukunan intern dan antar umat beragama, serta memberikan rasa aman dan perlindungan dari tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama.
8. Tantangan terberat di dalam membangun aspek politik adalah menjaga keberlangsungan proses demokrasi yang ada dan terus meningkatkan kualitas demokrasi tersebut. Untuk menjaga proses demokratisasi tersebut sangat diperlukan pendidikan politik secara terus menerus kepada masyarakat serta peningkatan kualitas partisipasi masyarakat pada proses pembuatan kebijakan. Rendahnya partisipasi aktif dan respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah akan menyebabkan tidak akomodasinya kepentingan mereka dan menurunkan peran serta mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam jangka 20 tahun ke depan, koordinasi dan komunikasi politik yang efektif merupakan kata kunci bagi terjaminnya kondusifitas warga. Peran Ormas maupun OKP penting diarahkan agar nilai-nilai demokrasi selaras dengan nilai-nilai sosial budaya warga yang telah terbangun selama ini.

9. Aliran budaya luar sebagai dampak globalisasi semakin kencang dan deras disertai dengan lemahnya filter bagi perkembangan informasi dari berbagai media (internet, film, televisi dsb). Semakin berkembang informasi disertai teknologi informasi yang canggih akan berakibat negatif apabila tidak disertai dengan pengetahuan dan manfaat. Meskipun telah memiliki sejarah toleransi beragama yang kuat bukan tidak mungkin terjadi infiltrasi dari luar yang mendorong konflik horisontal. Oleh karena itu dalam kerangka waktu 20 tahun ke depan, maka nilai budaya yang bersumber dari kearifan lokal harus dapat dipertahankan dari arus budaya modern yang kurang mendukung aspek moral dan etika bermasyarakat, berbangsa, dan beragama. Terciptanya kreasi-kreasi budaya daerah yang bersumber dari nilai-nilai luhur serta berkembang menjadi simbol daerah. Terciptanya masyarakat religius yang menjadikan agama sebagai sumber motivasi dalam membangun dan mewujudkan cita-cita bangsa dan negara.
10. Pelibatan perempuan di dalam proses pembangunan di masa mendatang sangatlah penting. Hal ini mengingat pengaruh perempuan di dalam peningkatan ekonomi rumah tangga. Di bidang politik, peran perempuan tentunya perlu diperbesar termasuk di bidang ekonomi.
11. Dalam jangka panjang 20 tahun ke depan, komunikasi antar umat beragama perlu intensif dilakukan, mengingat iklim demokrasi sebagai pilihan perubahan ternyata juga membawa dampak perilaku individu yang kebablasan sehingga dapat berpotensi memicu konflik yang tidak perlu. Tiga komponen utama modal sosial, yakni rasa saling percaya (*trust*), jaringan sinergis antara warga (*network*) dan nilai-nilai keberagaman (*values*) perlu ditumbuhkembangkan di kalangan umat beragama. Konsep Trilogi Kerukunan Umat Beragama, yakni (1) kerukunan intern umat beragama, (2) kerukunan antar umat beragama, dan (3) kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah, masih relevan untuk diimplementasikan. Pemerintah sebagai implementator program dan fasilitator kehidupan beragama ke depan dituntut proaktif menjaga kondisi harmonisasi melalui berbagai program yang tepat sasaran serta kebijakan izin pendirian rumah ibadah penting dilakukan setelah melakukan proses dialog dengan pemuka-pemuka agama.
12. Semakin besarnya beban pembangunan nasional akan menyebabkan pengurangan dana ke daerah. Hal ini akan membuat beban pemerintah daerah akan semakin besar pula. Di samping itu tantangan untuk menghilangkan KKN di dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan tantangan yang cukup besar di masa mendatang. Selain itu, isu-HAM juga menjadi tantangan tersendiri di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Ketidak siapan SDM pemerintah dalam menghadapi globalisasi dan aplikasi teknologi informasi akan memperlambat akselerasi kinerja pemerintahan

## **B. Ekonomi**

1. Pembangunan ekonomi sampai saat ini, meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan, masih jauh dari cita-citanya untuk mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mengsejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, tantangan besar kemajuan perekonomian 20 tahun mendatang adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi ketertinggalan dari kota-kota lain yang lebih maju.
2. Kemajuan ekonomi perlu didukung oleh kemampuan suatu daerah di dalam mengembangkan potensi dirinya untuk mewujudkan kemandirian. Kepentingan utama dalam pembangunan tersebut adalah mempertahankan kedaulatan

perekonomian serta mengurangi ketergantungan ekonomi dari pengaruh luar, tetapi tetap berdaya saing. Dengan pemahaman itu, tantangan utama kemajuan ekonomi adalah mengembangkan aktivitas perekonomian yang didukung oleh penguasaan dan penerapan teknologi serta peningkatan produktivitas SDM, mengembangkan kelembagaan ekonomi yang efisien yang menerapkan praktik-praktik terbaik dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, serta menjamin ketersediaan kebutuhan dasar.

3. Tantangan utama dalam pembiayaan Kota Tebing Tinggi dalam kurun waktu 20 tahun ke depan adalah memanfaatkan desentralisasi fiskal serta meningkatkan sumber-sumber keuangan daerah, serta mengurangi pengeluaran daerah yang berlebihan untuk membiayai administrasi pemerintah. Pemerintah Kota Tebing Tinggi memprioritaskan pengeluaran mereka pada bidang-bidang yang akan berdampak langsung terhadap penyediaan layanan masyarakat. Sesungguhnya desentralisasi telah memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada daerah dalam bentuk wewenang dari pada fungsi pemerintah.

### C. Sarana dan Prasarana

1. Tantangan yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, adalah (a) melakukan reformasi secara serentak, khususnya yang berkaitan dengan perpajakan daerah, *retribusi/biaya perizinan daerah, pertanahan dan tata ruang*, sebagai upaya untuk menekan dan mengurangi harga rumah sehingga dapat meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat; (b) menyempurnakan pola subsidi sektor perumahan yang tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan pasti, khususnya subsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah; (c) mendorong adanya insentif perpajakan kepada dunia usaha agar berpartisipasi secara langsung dalam penyediaan perumahan; dan (d) melakukan penguatan swadaya masyarakat dalam pembangunan rumah melalui pemberian fasilitas kredit mikro perumahan, fasilitasi untuk pemberdayaan masyarakat, dan bantuan teknis kepada kelompok masyarakat yang berswadaya dalam pembangunan rumah. Dengan demikian, penyediaan perumahan dapat diselenggarakan dengan tidak hanya mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat, melainkan juga melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
2. Dengan makin terbatasnya sumber dana yang dapat di mobilisasi oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana, anggaran pemerintah akan lebih difokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana yang secara ekonomi dan sosial bermanfaat. Untuk proyek sarana dan prasarana yang layak secara finansial akan dibangun dengan memanfaatkan dana-dana masyarakat dan membuka peluang kerja sama dengan badan usaha, terutama swasta dalam rangka penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana.
3. Tantangan yang dihadapi oleh sektor transportasi pada masa yang akan datang adalah mengembangkan sistem transportasi perkotaan yang efisien dan efektif, terjangkau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan peningkatan transportasi yang terpadu antarmoda dan intramoda serta selaras dengan pengembangan wilayah, mewujudkan pelayanan transportasi yang mendukung pembangunan ekonomi sosial dan budaya. Tantangan utama dalam rangka meningkatkan peran serta negara, swasta, dan masyarakat dalam pelayanan transportasi publik, mengembangkan alternatif pembiayaan dan investasi, dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi transportasi yang tepat guna, hemat energi, dan ramah lingkungan.

#### **D. Wilayah dan Tata Ruang**

1. Sangat disadari bahwa otonomi daerah memberikan berkah sekaligus musibah bagi pembangunan. Masalah utama yang timbul dalam pembangunan perkotaan dalam era otonomi daerah di masa yang akan datang mencakup: 1) Konflik kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, 2) Krisis ideologi kepentingan publik dimana pemerintah tidak cukup legitimate untuk mendefinisikan sendiri kepentingan umum/publik, 3) Krisis solidaritas lintas wilayah yang mencakup air baku, tempat pembuangan akhir sampah, pengendalian banjir dan drainase dan lain sebagainya, 4) Krisis perbatasan akibat koordinasi antara daerah yang lemah seperti : terminal, pasar jalan terputus dan rusak dan sebagainya, serta 5) Kurangnya partisipatif dalam proses pembangunan.
2. Pengaturan tata ruang sesuai peruntukan merupakan tantangan pada masa yang akan datang yang harus dihadapi untuk mengatasi krisis tata ruang yang telah terjadi. Untuk itu diperlukan penataan ruang yang baik dan berada dalam satu sistem yang menjamin konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang. Penataan ruang yang baik diperlukan bagi (a) arahan lokasi kegiatan, (b) batasan kemampuan lahan, termasuk di dalamnya adalah daya dukung lingkungan dan kerentanan terhadap bencana alam, (c) efisiensi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang dalam rangka penyelenggaraan berbagai kegiatan.
3. Penataan ruang yang baik juga harus didukung dengan regulasi tata ruang yang searah, dalam arti tidak saling bertabrakan antarsektor, dengan tetap memerhatikan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan, serta kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana.
4. Dimasa yang akan datang tantangan pokok berkaitan dengan penataan ruang mencakup: 1) Dominasi kepentingan sektoral yang lebih diutamakan dari pada kepentingan umum dan kepentingan masyarakat, 2) Rencana tata ruang belum diacu sebagai payung dalam penyusunan program pemanfaatan ruang, 3) Dinamika pembangunan masyarakat yang lebih cepat dari pada upaya perencanaan, 4) Partisipasi masyarakat dan swasta dalam proses penataan ruang yang masih rendah, 5) Keterbatasan kemampuan aparat penyelenggara penataan ruang di daerah, dan 6) Pedoman standar dan petunjuk teknis yang lengkap dalam penyelenggaraan penataan ruang masih belum lengkap.

#### **E. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

1. Sejak diperkenalkannya konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan diperkenalkannya konsep Kota Sehat, peranan sumber daya alam dalam pembangunan ekonomi sangat diperhitungkan. Pertumbuhan ekonomi dinilai berkorelasi positif dengan kapasitas sumberdaya alam. Namun, pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan secara tidak efisien dan berorientasi kepada kepentingan jangka pendek, akan mengakibatkan pengurangan sumber daya alam secara tidak terkendali dan akhirnya akan menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan. Di bidang lingkungan, prakiraan dampak lingkungan yang ditimbulkan baik akibat proses alamiah maupun akibat aktivitas manusia akan mempengaruhi beberapa komponen lingkungan diantaranya air, udara, tanah, flora dan fauna. Oleh karenanya, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya alam dalam 20 tahun mendatang adalah bagaimana memanfaatkan dan mengelola serta memelihara sumber daya alam berkelanjutan, bagi peningkatan

kesejahteraan agar masyarakat memperoleh kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup yang bersih, sehat, adil dan berkelanjutan.

2. Pemanfaatan ruang kawasan sungai pada masa yang akan datang dihadapkan pada fungsi penyangga (buffer), pelindung dan pengamanan dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu keselestarian tanpa mengurangi manfaatnya sebagai kawasan *river front area*, wisata, jalur hijau dan vegetasi.
3. Kebijakan pembangunan kota yang selama ini kurang memberikan perhatian yang memadai pada kesenjangan juga menimbulkan beberapa eksekusi negatif terhadap pembangunan kota, antara lain: menumpuknya kegiatan ekonomi di kawasan tertentu, terjadinya pertumbuhan kota yang tidak terkendali yang mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan perkotaan; melebarnya kesenjangan pembangunan antara kecamatan, meningkatnya kesenjangan pendapatan perkapita, rendahnya produktivitas; kurangnya keterkaitan kegiatan pembangunan antar kawasan; dan tingginya konversi lahan pertanian ke non pertanian. Kondisi ini harus segera diantisipasi agar dampak negatif pembangunan dapat dihindari sedini mungkin.
4. Perubahan iklim secara global yang menambah tekanan kota yang mencakup ancaman berupa: krisis air baku, krisis pangan, krisis sanitasi, krisis energi dan peningkatan resiko banjir.

### II.3 MODAL DASAR

Dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, keseluruhan potensi pembangunan kota akan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya untuk kemajuan dan kemakmuran. Potensi pembangunan ini dikelola dan diberdayakan secara tepat, sehingga benar-benar dipergunakan untuk mengatasi hambatan dan tantangan pembangunan kota yang ada. Potensi pembangunan kota yang menjadi modal dasar pembangunan Kota Tebing Tinggi dalam 20 tahun mendatang meliputi:

1. Secara geografis, Kota Tebing Tinggi adalah salah satu dari tujuh kota yang ada di propinsi Sumatera Utara, yang berjarak sekitar 80 km dari Kota Medan. Kota Tebing Tinggi berada di bagian tengah Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, yang dibatasi oleh PTPN III Rambutan di sebelah Utara, PT, Socfindo Kebun Tanah Besih di sebelah Timur, PTPN III Kebun Pabatu di sebelah Selatan, dan PTPN III Kebun Gunung Pamela di sebelah Barat.
2. Penduduk dengan budaya sangat beragam merupakan sumber daya potensial dan produktif bagi pembangunan.
3. Memiliki potensi dukungan sumber daya alam daerah hinterland dan kawasan yang sangat strategis. Wilayah Kota Tebing Tinggi secara keseluruhan berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai dan kawasan perkebunan negara. Secara relatif, daerah hinterland merupakan salah satu daerah yang kaya dengan sumber daya alam (SDA), khususnya di bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Kondisi ini memungkinkan bagi Kota Tebing Tinggi untuk mengembangkan sektor industri pengolahan terpilih yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi, yang memiliki keunggulan kompetitif serta akan menjadi pondasi utama dalam membangun ekonomi kota yang berdaya saing tinggi.
4. Perkembangan pembangunan yang telah dicapai baik dalam bidang ekonomi, sosial dan sarana prasarana serta pengelolaan pembangunan yang merupakan modal dalam melakukan pembangunan selanjutnya.

5. Tidak kalah pentingnya adalah pemerintahan kota yang legitimate berdasarkan seleksi politik yang demokratis, sehingga secara langsung juga menciptakan situasi dan kondisi bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang kondusif, yang berbasis multikulturisme.

## **II.4 PREDIKSI KONDISI UMUM**

Prospek pembangunan Kota Tebing Tinggi tahun 2006-2025, dapat disajikan sebagai berikut:

### **A. Pertumbuhan Ekonomi**

Dengan memperhatikan kondisi ekonomi makro di tingkat nasional dan regional, stabilnya situasi politik dan keamanan, membaiknya iklim investasi, serta adanya peningkatan sarana dan prasarana di bidang ekonomi, peningkatan akses pelaku ekonomi lokal, khususnya UKMK, pengembangan kemitraan melalui fasilitas, kemudahan, dan insentif berusaha bagi pelaku ekonomi, peningkatan produktivitas tenaga kerja yang profesional, serta pengembangan produk-produk unggulan, maka *prospek pertumbuhan ekonomi berdasarkan harga berlaku diharapkan akan tumbuh rata-rata sebesar 11,19% selama tahun 2006-2025.*

### **B. Perkembangan PDRB dan PDRB Perkapita**

Berdasarkan Atas Harga Berlaku, PDRB Kota Tebing Tinggi tahun 2006 mencapai 1,4 triliun rupiah, diproyeksikan menjadi 2,1 triliun rupiah pada tahun 2010, dan pada tahun 2025 diharapkan meningkat menjadi 7,3 triliun rupiah.

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Kota Tebing Tinggi juga meningkatkan PDRB perkapita, sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jika pada tahun 2006 PDRB perkapita masih sebesar 10,28 juta rupiah, maka pada tahun 2010 diperkirakan naik menjadi 14,18 juta rupiah dan diharapkan meningkat menjadi 29,95 juta rupiah pada tahun 2025.

### **C. APBD dan PAD**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, akibat adanya peningkatan pembangunan kota. Pada tahun 2010 APBD Kota Tebing Tinggi diperkirakan mencapai 412,8 milyar rupiah, dan pada tahun 2025, diharapkan dapat mencapai 2.689 milyar rupiah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tebing Tinggi dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2010 total PAD Kota Tebing Tinggi diperkirakan sebesar 18,2 milyar rupiah, dan meningkat menjadi 146,8 milyar rupiah pada tahun 2025.

### **D. Kependudukan**

Penduduk Kota Tebing Tinggi selama periode tahun 2006-2010 diperkirakan akan tumbuh sebesar 1,5 persen atau mencapai 146.425 jiwa pada tahun 2010 dan pada tahun 2025 jumlah penduduk mencapai 242.402.

Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2010 diperkirakan mencapai 76,51 dan akan meningkat menjadi 82,45 pada tahun 2025.

Pada tahun 2025, kesejahteraan penduduk meningkat secara bertahap Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi 1,8%; dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat menjadi 77,2%.

**Angka Eksisting dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Dan Indikator Kesejahteraan Sosial  
Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 – 2025**

No	Uraian	Satuan	Eksisting					Perkiraan				
			2004	2005	2006	2010	2015	2020	2025			
<b>A</b>	<b>INDIKATOR MAKRO KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>											
1	Jumlah Penduduk	ribu jiwa	134.976	135.671	137.959	146.425	156.193	164.975	242.402			
2	Pertumbuhan Penduduk	Persen		0,51	1,69	1,5	1,3	1,1	0,8			
3	Luas Wilayah	Km2	38	38	38	38	38	38	38			
4	Kepadatan Penduduk	jiwa/km2	3.512	3.530	3.589	3.853	4.110	4.341	6.378			
5	Angka Partisipasi Sekolah (APS)											
	- 7 – 12	Persen	98,13	99,36	92,35	92,72	93,18	95,54	99,42			
	- 13 – 15	Persen	91,56	88,95	74,69	77,11	89,39	93,95	98,74			
	- 16 – 18	Persen	74,07	65,61	70,70	70,98	82,29	86,49	94,97			
	- 19 – 24	Persen	8,55	10,21	7,75	8,06	12,99	20,92	32,18			
6	Umur Harapan Hidup	Tahun	70,1	70,3	70,3	71,5	73,0	74,5	76,0			
7	Angka Kesakitan Umum	Persen	17,0	13,9	16,8	10,76	9,70	8,65	7,80			
8	Angkatan Kerja	Persen	54,8	64,9	59,9	61,5	63,4	65,2	66,9			
9	Bukan Angkatan Kerja	Persen	45,4	35,1	40,1	38,5	36,6	34,8	33,1			
10	TPAK	Persen	61,16	64,87	59,93	63,6	67,9	72,4	77,2			
11	Pengangguran Terbuka	Persen	19,00	15,92	13,67	9,0	5,3	3,1	1,8			
12	IPM		74,0	74,3	75,0	76,51	78,44	80,42	82,45			
<b>B</b>	<b>INDIKATOR MAKRO EKONOMI</b>											
1	PDRB AD Harga Beraku	Rp. Juta	1.091.217,33	1.255.433,39	1.417.741,25	2.075.715	2.930.041	4.508.231	7.260.552			
2	Pertumbuhan Ekonomi (ADHB)	Persen	11,22	15,05	12,93	10,00	9,00	11,37	12,65			
3	PDRB Per-Kapita ADH Beraku	Rp. Jutaan	8,08	9,25	10,29	14,18	18,76	27,33	29,95			
4	EKSPOR	Rp. Milyar	70,55	84,33	134,21	145,27	160,39	177,09	195,52			
5	APBD	Rp. Milyar	155,0	156,0	236,0	412,8	830,2	1.689,9	2.689,3			
6	PAD	Rp. Milyar	9,7	9,4	13,4	18,2	29,3	73,0	146,8			

### BAB III VISI, MISI DAN TUJUAN PEMBANGUNAN

#### III.1 UMUM

Perencanaan pembangunan kota yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang mencakup rentang waktu 20 tahun ke depan hanya dapat disusun apabila visi yang dicapai dalam rentang waktu tersebut telah dirumuskan dengan jelas. Visi yang ingin dicapai haruslah benar-benar mampu menjawab permasalahan strategis masyarakat Kota Tebing Tinggi sehubungan dengan perubahan dan perkembangan lingkungan eksternal baik dalam lingkup lokal maupun domestik dan global.

Dengan potensi, karakteristik, peluang, tantangan, sikap dan pandangan hidup bersama, modal dasar pembangunan kota pada lebih dari 20 tahun yang akan datang, dan tujuan pokok pembangunan kota yang ingin diwujudkan, serta kemutlakkan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka visi pembangunan Kota Tebing Tinggi tahun 2006–2025 ditetapkan sebagai berikut:

#### III.2 VISI DAN MISI

##### VISI:

#### KOTA JASA DAN PERDAGANGAN DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS

##### Penjelasan:

1. Sebagai **Kota jasa** yang ingin diwujudkan adalah Kota yang didukung oleh fasilitas perkotaan modern, yang melayani masyarakat Kota Tebing Tinggi serta masyarakat di wilayah sekitarnya, didukung oleh pelayanan publik yang handal. Sebagai Kota jasa, pembangunan kota diarahkan menuju layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas yang berskala regional dan nasional, serta sebagai pusat perkantoran, baik Pemerintah maupun swasta, dengan pelayanan informasi dan teknologi tingkat tinggi. Sebagai kota jasa, Kota Tebing Tinggi juga diharapkan berfungsi sebagai pusat layanan keuangan regional dengan dukungan perbankan, tempat hiburan, pendidikan dan kesehatan, dengan lingkungan yang nyaman, tertib, aman, rapi, indah dan bersahabat.
2. **Kota Perdagangan;** Pembangunan kota diarahkan menjadi pusat perdagangan secara regional, kawasan transit lalu lintas orang dan barang dari dan menuju kota Medan serta didukung oleh munculnya kota-kota baru, pasar-pasar dengan produk khusus dan lain-lain dengan tetap menyelaraskan tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat perdagangan tradisional. Sebagai Kota perdagangan, ekonomi Kota Tebing Tinggi memiliki peran penting untuk memperluas pasar produk yang dihasilkan, untuk mendukung perekonomian Kota Tebing Tinggi yang semakin terbuka.
3. **Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas** pada Visi Kota Tebing Tinggi ini dimaksudkan sebagai masyarakat yang berpendidikan minimal Wajib Belajar 12 tahun dan memiliki kompetensi yang sehat jasmani dan rohani.

4. Visi pembangunan kota tahun 2006–2025 yang disepakati mengarah dan selaras dengan visi dan tujuan pembangunan nasional dan pembangunan propinsi, sebagaimana ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025, yang diindikasikan melalui tingkat kemajuan, kesejahteraan, dan keadilan yang ingin diwujudkan secara bertahap dan berkelanjutan. Visi ini juga merupakan kelanjutan dari visi pembangunan kota dalam jangka menengah (2006-2010) yaitu Tebing Tinggi menjadi kota jasa yang bertumpu pada kualitas pendidikan dan kesehatan serta meningkatnya daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
5. Secara ekonomis, kemajuan pembangunan kota dalam 20 tahun ke depan, akan ditandai oleh produktivitas ekonomi yang tinggi, yang mendorong peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat dalam jangka panjang, sehingga membentuk perekonomian kota yang tangguh, dinamis, progresif dan merata. Peningkatan produksi dan pendapatan tersebut, digerakkan oleh adanya akumulasi modal, alokasi sumber daya yang lebih efisien dan efektif serta distribusi hasil-hasil pembangunan yang lebih merata, sehingga menggambarkan perubahan dan pertumbuhan ke arah kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan yang berkeadilan.
6. Kemajuan pembangunan Kota Tebing Tinggi pada masa yang akan datang juga ditandai oleh adanya transformasi struktur perekonomian kota menuju perekonomian yang modern, yang ditandai oleh dominasi sektor tertier dan sekunder, khususnya jasa dan industri pengolahan. Perkembangan ekonomi sektor sekunder dan tertier tersebut, juga sekaligus sebagai penyedia lapangan kerja terbesar bagi angkatan kerja.  
Oleh karena itu, strategi pengembangan ekonomi sektor sekunder dan tertier, merupakan strategi utama dalam jangka panjang, untuk mengendalikan angka pengangguran, menurunkan jumlah penduduk miskin, sekaligus sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi kota.
7. Kemajuan ekonomi Kota Tebing Tinggi pada masa yang akan datang juga didorong oleh peningkatan efisiensi perekonomian kota, sehingga pengelolaan sumber daya ekonomi yang rasional dan efisien akan menghasilkan produktivitas yang tinggi, ketahanan ekonomi lokal yang kuat dan kokoh serta keterkaitan antar sektor-sektor ekonomi kota khususnya sektor industri dan jasa yang tinggi, serta berwawasan lingkungan. Sebagai bagian dari ekonomi wilayah, maka kemajuan ekonomi kota tersebut akan banyak dipicu oleh pengembangan ekonomi regional yang saling tergantung satu sama lainnya saling menguntungkan.
8. Di samping kemajuan secara ekonomi, kemajuan Kota Tebing Tinggi dalam 20 tahun yang akan datang, juga ditandai oleh kemajuan di bidang pembangunan sosial. Kemajuan pembangunan sosial ditandai oleh derajat pendidikan dan kesehatan yang tinggi, sehingga menciptakan dan menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pembangunan kota, pada masa yang akan datang, lebih banyak digerakkan oleh dukungan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan, dan menguasai teknologi, beriman dan bertaqwa serta memiliki kemandirian, sehingga menciptakan keseimbangan antara kemajuan fisik/prasarana, sosial dan ekonomi kota, berdasarkan ekosistem dan landasan moral pembangunan.
9. Berbagai indikasi lainnya, dari kemajuan pembangunan kota pada masa yang akan datang adalah penduduk yang berkualitas, dan tumbuh seimbang, kualitas pelayanan umum (*public service*) yang prima, kelembagaan Pemerintah Kota dan masyarakat yang mapan, perilaku kreatif, inovatif yang menonjol, produktivitas masyarakat yang tinggi, dan berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang

mendorong berkembangnya wilayah regional, serta kemampuan yang semakin tinggi untuk membiayai pembangunan kota.

10. Kota Tebing Tinggi yang maju juga ditandai oleh tersedianya prasarana dan sarana sosial ekonomi yang modern, handal dan asri, sehingga seluruh kebutuhan infrastruktur masyarakat kota dapat dinikmati secara merata, dengan lingkungan hidup yang berkualitas.  
Sedang masyarakat yang maju, ditandai oleh keterbukaan terhadap inovasi, berwawasan global, berorientasi kepada masa sekarang dan masa depan, mengedepankan perencanaan dan pengorganisasian, mampu mengoptimalkan daya dukung alam, mandiri, menghormati orang lain, mengedepankan iptek, dan berkeadilan sosial, serta demokratis.
11. Keadilan sosial secara nyata, diwujudkan melalui fungsi-fungsi distributif yang dikelola oleh Pemerintah Kota, sehingga hak-hak dasar setiap warga kota dapat terpenuhi dan dilindungi. Setiap warga kota hidup sederajat, dan bermartabat serta mampu melindungi kehormatannya atas dasar kemanusiaan. Terpenting juga adalah, adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga kota untuk berprestasi dan memperoleh pelayanan umum yang cukup dan berkualitas.
12. Sedang keadilan ekonomi, terwujud dalam bentuk adanya kesamaan kesempatan dan akses dari setiap warga kota untuk berusaha sebagai upaya meningkatkan kesejahteraannya. Untuk itu, keadaan yang cukup menonjol dalam tata Kota yang maju, sejahtera dan berkeadilan, adalah adanya akses yang luas masyarakat terhadap setiap sumber daya pembangunan kota, seperti permodalan, pasar, dan faktor-faktor produksi lainnya. Keterkaitan ekonomi kota dilakukan tidak hanya antar daerah, atau kawasan, dan antar sektor, tetapi juga antar skala usaha yaitu antara usaha kecil, menengah, dan besar.

#### **MISI:**

Agar Visi tersebut di atas dapat tercapai, maka yang menjadi Misi Kota Tebing Tinggi tahun 2006-2025 adalah:

1. **Mewujudkan Pemerintahan Kota yang bersih dan berwibawa.** Tata pemerintahan yang baik dan bersih merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan agar setiap sumber daya yang dimanfaatkan dalam membangun daerah dan bangsa dapat mencapai hasil guna dan daya guna yang maksimal. Tata pemerintahan yang baik dan bersih hanya dapat diwujudkan apabila aparatur sebagai tulang punggung pembangunan juga cukup kuat. Aparatur yang kuat akan tercipta melalui sistem pembinaan yang berkualitas tinggi. Tata pemerintahan yang baik dan bersih ditandai oleh terwujudnya kepastian hukum guna menjamin keamanan dan ketertiban umum, tersedianya peraturan daerah yang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan daerah; terselenggaranya pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat, meningkatnya profesionalisme dan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah guna terwujudnya birokrasi yang bersih dan berwibawa, dan terselenggaranya pelayanan pemerintahan kepada publik yang transparan, cepat, murah dan efektif dengan mengedepankan kepuasan masyarakat;
2. **Mewujudkan perekonomian kota yang tangguh,** berarti meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat melalui akumulasi modal, alokasi sumber daya serta distribusi hasil-hasil pembangunan kota secara lebih merata; mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor jasa perdagangan, keuangan dan industri yang kuat dan kokoh; meningkatnya produk-produk unggulan yang kompetitif meliputi sektor industri, pertanian dan jasa; meningkatnya investasi sektor swasta,

meningkatkan efisiensi perekonomian kota; berkembangnya UKM dengan tingkat pengelolaan yang makin efisien sehingga menjadi basis ekonomi daerah, meningkatkan ketahanan ekonomi lokal dan regional; mendorong pengembangan ekonomi regional; serta meningkatkan daya saing lokal, regional maupun nasional. Langkah yang perlu ditempuh adalah dengan membuat pusat pelayanan dan beberapa subpusat pelayanan yang menarik masyarakat kota untuk datang berbelanja dan memanfaatkan fasilitas yang ada di Kota Tebing Tinggi. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah secara berkesinambungan yang diikuti oleh pemerataan pendapatan masyarakat, menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin.

3. **Mewujudkan masyarakat kota yang sehat, cerdas dan mermartabat**, berarti meningkatkan derajat pendidikan masyarakat; meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; meningkatkan kualitas penduduk; meningkatkan kualitas pelayanan umum; meningkatkan kualitas kelembagaan masyarakat; meningkatkan perilaku masyarakat yang kreatif, inovatif, dan produktif; meningkatkan kerjasama regional, internasional yang saling ketergantungan, membutuhkan dan saling menguntungkan serta masyarakat yang bermoral, beretika, dan berbudaya yang dicirikan dengan perilaku masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. **Mewujudkan sarana dan prasarana kota yang modern dan asri**, dengan memfokuskan arah pembangunan kota pada upaya pengelolaan tata ruang yang berdaya guna dan berhasil guna serta berkelanjutan; membangun dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju; membangun dan mengembangkan perumahan dan permukiman yang sehat dan terjangkau; meningkatkan kemitraan dan partisipasi masyarakat dalam penyediaan kebutuhan infrastruktur kota; meningkatkan iklim penanaman modal dan bisnis yang kondusif; terbangunnya infrastruktur kota yang akomodatif yang meliputi jalan, jembatan, drainase, dan persampahan yang disertai dengan tersedianya fasilitas dan utilitas umum yang modern dan representatif serta meningkatnya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan digunakannya standard pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan, aktivitas sosial maupun ekonomi.

### III.3 TUJUAN PEMBANGUNAN KOTA

Berdasarkan visi dan misi pembangunan kota jangka panjang, maka tujuan pembangunan kota jangka panjang tahun 2006-2025 yang ditetapkan adalah **MEWUJUDKAN MASYARAKAT KOTA TEBING TINGGI YANG BERKUALITAS, PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING DALAM BIDANG EKONOMI DAN SOSIAL DALAM WADAH TATA PEMERINTAHAN KOTA YANG BERSIH DAN BERWIBAWA.**

Untuk mencapai konsisi umum dalam 20 tahun ke depan, maka pembangunan kota pada masa yang akan datang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran utama sebagai berikut:

1. **Terwujudnya tata pemerintahan daerah yang akuntabel, demokratis dan berlandaskan hukum guna melindungi kepentingan masyarakat di atas kemajemukan menuju masyarakat madani yang sejahtera.**

Kota Tebing Tinggi yang akuntabel kondusif, demokratis dan berlandaskan hukum adalah harapan semua orang karena merupakan prasyarat bagi terciptanya perlindungan terhadap hak-hak sosial ekonomi dan politik setiap anggota masyarakat ditengah kehidupan yang semakin kompleks. Perwujudan Kota Tebing Tinggi yang demokratis berlandaskan hukum mencakup:

- a. Percepatan terciptanya *good governance*, transparansi dan akuntabilitas pada pemerintahan kota khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik yang transparan, cepat, murah dan efektif dengan mengedepankan kepuasan masyarakat melalui pemberdayaan kelurahan.
  - b. Tersedianya peraturan daerah yang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan daerah.
  - c. Pemantapan kesadaran hukum pada masyarakat, dan peningkatan kemampuan menghargai oleh semua pihak terhadap hak-hak melekat pada individu atau kelompok.
  - d. Penguatan kesadaran segenap lapisan masyarakat dalam melaksanakan peranannya pada semua kegiatan yang bercirikan demokratisme seperti pemilu, pilkada, pilkades dan lain-lain.
  - e. Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah guna terwujudnya birokrasi yang bersih dan berwibawa.
- 2. Terwujudnya ekonomi daerah yang maju dan memiliki daya saing untuk mencapai masyarakat yang sejahtera.**

Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkesinambungan selama tahun 2006-2025, menguatnya struktur ekonomi serta semakin meningkatnya daya saing produk-produk lokal. Pendapatan per kapita masyarakat pada akhir tahun 2025 diharapkan akan mencapai Rp. 29,95 juta, tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin diharapkan kurang dari 3%.

- a. Perbaikan struktur ekonomi Kota Tebing Tinggi dan persebaran pertumbuhan masing-masing sektor yang harmonis sehingga perekonomian Kota Tebing Tinggi semakin kokoh terlihat dari dominasi sektor sekunder (industri pengolahan dan konstruksi) dan sektor tertier (perdagangan, keuangan dan jasa-jasa). Kondisi ini akan membentuk kerangka dan struktur perekonomian kota yang tangguh, kuat dan kokoh. Sektor jasa perdagangan, keuangan dan industri menjadi ciri dan mesin penggerak perekonomian kota.
- b. Terwujudnya perekonomian kota yang efisien dan efektif yang didukung produk-produk unggulan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, serta pengelolaan sumber daya ekonomi kota yang berkualitas dan berkelanjutan.
- c. Tersedianya kebutuhan pokok warga kota secara cukup seperti sandang pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan serta jaminan kehidupan yang layak bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
- d. Peningkatan taraf hidup warga kota, yang didorong dengan meningkatnya penyediaan lapangan kerja, dan pendapatan, pendidikan yang lebih baik, perhatian lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan harga diri.
- e. Terjaminnya pemenuhan kebutuhan primer, sekunder dan tertier warga kota, dengan distribusi dan ketersediaan yang terjamin, sehingga menciptakan stabilitas harga.
- f. Peningkatan kemandirian Usaha Kecil dan Menengah mencakup peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pengembangan SDM yang memadai dan pembinaan dan pemantapan sistem pemasaran.

- g. Penataan dan penguatan basis jasa, perdagangan dan industri mencakup pengembangan struktur industri kecil, menengah dan besar yang kuat dan mandiri; pengembangan pola keterkaitan usaha produksi, distribusi dan jasa pelayanan dalam kawasan industri, peningkatan kemampuan penguasaan dan penerapan teknologi industri sesuai kebutuhan, perumusan strategi peningkatan daya saing melalui pengembangan kawasan industri berbasis tenaga kerja terampil dan terlatih, serta kawasan industri berbasis padat modal, penerapan standarisasi produk barang dan jasa sesuai kebutuhan regional dan global, dan peningkatan kualitas produk dan produktivitas usaha industri.

### 3. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat

Kualitas sumberdaya manusia masyarakat Kota Tebing Tinggi meningkat secara berkesinambungan sehingga pada akhir tahun 2025 penduduk berada pada kelompok IPM tinggi (>80). Pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas dalam jangka panjang antara lain ialah peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan, pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat, penyelenggaraan sistem jaminan sosial, pengendalian laju penduduk, pemberdayaan perempuan dan pemuda serta perlindungan anak serta perwujudan masyarakat yang bermoral dan beretika.

- a. Pembangunan pendidikan mencakup peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pendidikan yang sesuai dengan laju permintaan jasa pendidikan dengan tetap memperhatikan pencapaian keberhasilan wajib belajar 9 tahun. Penambahan tenaga guru baik ditingkat sekolah dasar maupun sekolah lanjutan pertama dan sekolah lanjutan atas perlu dipenuhi sesuai kebutuhan/perkembangan jumlah murid, ditingkatkan mutunya melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kursus, pelatihan dan permagangan hingga sertifikasi guru sehingga mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Fasilitas sekolah-sekolah baik bangunan, peralatan administrasi dan laboratorium perlu dilengkapi sehingga mencapai paling tidak pada tingkat kebutuhan minimal.
- b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dilakukan melalui upaya peningkatan kesehatan, upaya peningkatan sumberdaya manusia kesehatan, pengadaan peralatan kesehatan dan obat-obatan yang berkualitas serta pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan.
- c. Pemenuhan perumahan masyarakat dilakukan melalui pembangunan rumah tipe kecil dan perumahan massal yang pelaksanaannya dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah, perumnas, real estate dan perbankan.
- d. Penyelenggaraan sistem jaminan sosial dilakukan peningkatan kemandirian anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingannya khususnya kebutuhan dasar (*basic needs*) baik secara ekonomi maupun sosial khususnya.
- e. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dilakukan melalui peningkatan pelayanan keluarga berencana.
- f. Pemberdayaan perempuan mencakup peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan termasuk hak-hak demokratis yang melekat pada perempuan.
- g. Pembangunan pemuda meliputi peningkatan kualitas sumberdaya pemuda yang memiliki etos kerja tinggi dan dengan kesadaran mutu yang tinggi agar

dapat berperan sebagai sumber tenaga kerja produktif daerah dapat diandalkan sebagai salah satu komponen andalan daya saing daerah.

- h. Perwujudan masyarakat yang bermoral, beretika, dan berbudaya yang dicirikan dengan perilaku masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

#### 4. Terwujudnya kota yang dinamis, asri, dan berwawasan lingkungan.

Secara umum pengertian Kota dinamis adalah kota yang dapat beradaptasi dengan tuntutan dan kemajuan kota-kota lain di tingkat regional nasional bahkan internasional. Kondisi ini dapat dicapai apabila tercipta kualitas lingkungan fisik, sosial, budaya dan produktivitas, serta perekonomian yang sesuai dengan kebutuhan wilayah perkotaan.

- a. Penataan *jaringan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi* di dalam kota dan antar kota. Demikian pula perlu diciptakan prasarana dan sarana yang terintegrasi satu sama lain berbasis angkutan massal (*mass rapid transportation*), melalui peningkatan peran angkutan umum kereta api yang terintegrasi dengan kota-kota lain di sekitar untuk mengurangi beban mode angkutan jalan raya. Pemenuhan *pasokan energi* listrik, gas dan sumber energi lainnya serta air bersih sesuai kebutuhan yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi. Pemenuhan *prasarana dan sarana dasar kawasan permukiman perkotaan* sesuai Standar Nasional Indonesia secara merata, di seluruh wilayah yang telah direncanakan dalam rencana tata ruang kota. Penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta sistem informasi yang terintegrasi secara efisien dan modern, guna terciptanya masyarakat yang menguasai informasi.
- b. Peningkatan kualitas hidup, kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat kota secara merata.
- c. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat kota seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan transportasi secara adil dan merata.
- d. Penurunan tingkat kemiskinan relatif dan hapusnya kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif kurang dari 3,99%.
- e. Peningkatan pemahaman agama sebagai kekuatan pendorong, landasan moral, etika, dan perekat kohesi sosial dalam pembangunan kota dan kehidupan masyarakat.
- f. Peningkatan jaminan dan perlindungan terhadap rasa aman dan nyaman masyarakat yang tinggi dari setiap ancaman, gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar.
- g. Terwujudnya pengusaha dan perusahaan mikro, kecil, dan menengah menjadi usahawan formal dan maju serta terintegrasi dengan kegiatan ekonomi sektor modern.

**5. Meningkatnya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan digunakannya standard pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan, aktivitas sosial maupun ekonomi.**

Sejak diperkenalkannya konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable*), peranan sumber daya alam dalam pembangunan ekonomi sangat diperhitungkan. Pertumbuhan ekonomi dinilai berkorelasi positif dengan kapasitas sumber daya alam. Namun, pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan secara tidak efisien dan berorientasi kepada kepentingan jangka pendek, akan mengakibatkan pengurangan sumber daya alam secara tidak terkendali dan akhirnya akan menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan.

Di bidang lingkungan, prakiraan dampak lingkungan yang ditimbulkan, baik akibat proses alamiah maupun akibat aktivitas manusia, akan mempengaruhi beberapa komponen lingkungan diantaranya air, udara, tanah, flora dan fauna.

Oleh karenanya, tantangan yang dihadapi Kota Tebing Tinggi dalam pengelolaan sumber daya alam adalah bagaimana memanfaatkan dan mengelola serta memelihara sumber daya alam laut secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan, agar masyarakat dan seluruh warga kota memperoleh kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup yang bersih, sehat, adil dan berkelanjutan.

Sebagai kota perdagangan dan jasa, Kota Tebing Tinggi juga sangat rentan terhadap berbagai buangan, baik langsung maupun tidak langsung. Terbatasnya daya dukung kota, terhadap kemungkinan pencemaran akan menyebabkan Kota Tebing Tinggi pada masa yang akan datang sangat rentan terhadap pencemaran seperti udara yang semakin pengap, kualitas air yang semakin buruk dan masalah sampah.

Di sisi lain, *Health and Clean City* merupakan tuntutan kota-kota dunia di masa depan. Kelestarian dan keasrian lingkungan telah pula menjadi tema sentral pembicaraan diseluruh dunia. Saat ini lingkungan hidup telah mengalami pencemaran yang semakin mendekati titik kritis. Jika masalah ini tidak ditanggulangi secara serius sangat dikhawatirkan dampak negatif yang tak tertahankan akan terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pembangunan lingkungan hidup dan pelestarian sumber daya alam di Kota Tebing Tinggi mencakup:

- a. Penataan rencana tata ruang kota yang berkualitas serta berkesinambungan, yang didukung oleh penetapan Peraturan Daerah beserta ketentuan pelaksanaan sebagai dasar pembangunan prasarana dan sarana, serta terciptanya mekanisme pembangunan yang mampu menjamin pemanfaatan rencana tata ruang kota sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan panjang disertai dukungan transparansi serta upaya pengendalian pemanfaatan ruang kota secara komprehensif dan tegas, namun mampu mengakomodir kebutuhan perkembangan kota.
- b. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pendayagunaan ruang dan sumberdaya alam secara serasi, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang terlihat dari terpeliharanya fungsi dan daya dukung lingkungan dan ekosistem serta kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi yang secara serasi, seimbang dan lestari.
- c. Peningkatan kesadaran, sikap mental dan prilaku masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.

- d. Terciptanya ruang kota yang nyaman dengan ruang terbuka yang memadai untuk menjamin kualitas kesehatan dan hidup masyarakat kota yang lebih baik dan terpenuhinya baku mutu kualitas lingkungan air, tanah dan udara, dengan tetap memelihara nilai-nilai kawasan dan bangunan yang dilestarikan atau memiliki nilai sejarah; serta terwujudnya konservasi sumberdaya air dan sumberdaya lainnya yang mampu menjaga berlangsungnya pembangunan kota yang berkelanjutan.
- e. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga dan melestarikan kualitas lingkungan.

## BAB IV ARAH DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

### IV.1 ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

Telah diuraikan di depan bahwa tujuan pembangunan jangka panjang Kota Tebing Tinggi tahun 2006-2025 adalah mewujudkan masyarakat Kota Tebing Tinggi yang berkualitas, produktif dan berdaya saing dalam bidang ekonomi dan sosial dalam wadah tata pemerintahan kota yang bersih dan berwibawa. Sejalan dengan tujuan, telah diuraikan sasaran-sasaran yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, arah pembangunan Kota Tebing Tinggi selama periode 2006-2025 ditetapkan sebagai berikut:

#### **A. Mewujudkan Tata Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Demokratis dan Berlandaskan Hukum Guna Melindungi Kepentingan Masyarakat di atas Kemajemukan Menuju Masyarakat Madani yang Sejahtera**

Tata pemerintah yang akuntabel, demokratis yang berlandaskan hukum merupakan landasan penting untuk mewujudkan pembangunan masyarakat Kota Tebing Tinggi menuju masyarakat madani yang sejahtera. Demokrasi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan, dan memaksimalkan potensi masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hukum pada dasarnya bertujuan untuk memastikan munculnya aspek-aspek positif dan menghambat aspek negatif kemanusiaan serta memastikan terlaksananya keadilan untuk semua warga tanpa memandang dan membedakan kelas sosial, ras, etnis, agama, maupun gender. Hukum yang ditaati dan di ikuti akan menciptakan ketertiban dan keterjaminan hak-hak dasar masyarakat secara maksimal.

Untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis dan adil dilakukan dengan memantapkan pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat madani sehingga proses pembangunan partisipatoris yang bersifat *bottom up* bisa berjalan; menumbuhkan masyarakat tanggap (*responsive community*) yang akan mendorong semangat sukarela (*spirit of voluntarism*) yang sejalan dengan makna gotong royong; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; serta melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

1. Penataan peran pemerintah kota dan masyarakat dititikberatkan pada pembentukan kemandirian dan kedewasaan masyarakat serta pembentukan masyarakat madani yang kuat dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Di samping itu, penataan peran pemerintah kota dan masyarakat diarahkan pada penataan fungsi-fungsi yang positif dari pranata-pranata kemasyarakatan, lembaga adat, dan partai politik untuk membangun kemandirian masyarakat dalam mengelola berbagai potensi konflik sosial yang dapat merusak serta memberdayakan berbagai potensi positif masyarakat bagi pembangunan.
2. Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparatur pemerintah dicapai dengan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat, lini pemerintahan, dan semua kegiatan; pemberian sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku penyalahgunaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat; serta peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta pengetahuan

dan pemahaman para penyelenggara pemerintah terhadap prinsip-prinsip ketatapemerintahan yang baik.

3. Kualitas pelayanan umum yang ditingkatkan tidak terbatas hanya pada jasa pelayanan umum oleh Pemerintah Kota kepada warga kota, tetapi juga yang diselenggarakan pihak swasta, dengan atau tanpa pembayaran, guna memenuhi kebutuhan dan/atau kepentingan masyarakat.
4. Pemberian pelayanan umum prima, yang diwujudkan melalui penyederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan yang merata, ketepatan waktu terhadap prosedur/tata cara pelayanan umum.
5. Penataan kelembagaan masyarakat juga diarahkan untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat yang tinggi, sehingga warga kota memiliki pemahaman dan ketaatan hukum yang baik menyangkut hak dan kewajiban konstitusional sebagai warga negara, guna meningkatkan keterlibatannya dalam proses pembangunan kota.
6. Peningkatan kualitas kelembagaan masyarakat, baik yang bersifat sosial, ekonomi, latar belakang adat, agama, profesi, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya yang termasuk interest group maupun pressure group, diarahkan untuk mengembangkan kemandirian masyarakat dan meningkatkan kontribusinya dalam pembangunan kota. Untuk itu, pembinaan dan keterlibatan Pemerintah Kota lebih ditujukan kepada upaya membangun kedewasaan warga kota, sekaligus mendorong munculnya kelas menengah yang kuat, di berbagai bidang pembangunan kota.

## **B. Mewujudkan Perekonomian Kota yang Tangguh**

Perekonomian kota yang tangguh merupakan salah satu indikasi penting kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan sosial ekonomi dalam 20 tahun ke depan. Perekonomian kota yang tangguh selain dilakukan dengan meningkatkan produksi dan pendapatan, juga dilakukan dengan meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga kemampuan warga kota meningkat dalam memenuhi berbagai kebutuhan konsumsi, dalam jumlah yang dibutuhkan, dengan kualitas yang baik, serta harga yang wajar.

Untuk mencapai perekonomian kota yang tangguh, maka pembangunan Kota Tebing Tinggi diarahkan pada:

1. Perekonomian kota diarahkan agar terjadi transformasi struktur ekonomi yang mengarah pada pengembangan kota jasa dan perdagangan yang ditandai dengan meluasnya kegiatan perdagangan, jasa dan sebagainya disertai dengan transformasi sosial.
2. Peningkatan pendapatan perkapita secara merata, sehingga mencerminkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Kondisi ini ditandai oleh peningkatan indeks pembangunan manusia secara berkelanjutan. Untuk itu, perekonomian kota diarahkan berkembang secara rasional, menciptakan keterlibatan dan kesempatan luas masyarakat dalam kegiatan ekonomi, distribusi penguasaan dan kepemilikan faktor-faktor produksi, serta peningkatan kapasitas dan produktivitas pelaku ekonomi, khususnya di sektor usaha kecil menengah dan koperasi.
3. Meminimalkan tingkat pengangguran, dengan mendorong peningkatan kesempatan kerja baru, melalui penumbuhan lapangan kerja dan kegiatan ekonomi yang didukung perencanaan ketenagakerjaan daerah.

4. Menurunkan angka kemiskinan, dengan mendorong peningkatan produktivitas dan pendapatan yang diterima pekerja, sehingga meningkatkan daya beli masyarakat, sekaligus mengurangi kesenjangan antar kelompok pendapatan di masyarakat.
5. Pembangunan ekonomi kota juga diarahkan untuk menumbuhkan jenis-jenis pekerjaan dan usaha ekonomi yang dapat menyerap angkatan kerja secara masif, mendorong pengembangan lembaga-lembaga ekonomi baru, dan menciptakan keunggulan kompetitif sehingga akan muncul ekonomi kreatif sebagai pembangkit ekonomi kota.
6. Mengembangkan kegiatan bisnis di sektor jasa perdagangan, jasa restoran dan hiburan sebagai daya tarik wisatawan. Untuk itu, kebijakan ekonomi lokal diarahkan untuk mendorong usaha swasta meningkatkan mutu prasarana dan sarana serta fasilitas pelayanan akomodasi pariwisata bagi wisatawan lokal, nasional, dan internasional. Meningkatkan dan mengembangkan sistem transportasi kota yang bersifat massal, nyaman, dan modern, sehingga mendukung pengembangan perekonomian kota sebagai pusat pelayanan birokrasi, perkantoran bisnis, perdagangan, dan wisata. Mendorong kalangan swasta untuk membangun pusat perbelanjaan dan perhotelan yang modern bertaraf internasional, mempromosikan daerah secara berkesinambungan serta senantiasa meningkatkan iklim yang kondusif bagi kegiatan wisata konvensi dan bisnis pameran (expo) berskala nasional.
7. Mendorong pengembangan sektor tersier (jasa perdagangan dan jasa keuangan-perbankan), sehingga tercipta kota perdagangan dan keuangan yang berskala regional.
8. Mendorong pembaharuan dalam perekonomian kota, melalui peningkatan penataan manajemen, perubahan orientasi, dan penyederhanaan aturan serta menerbitkan peraturan daerah yang kondusif. Untuk itu, dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya ekonomi, mendorong alokasi sumber daya ekonomi yang semakin efisien, distribusi pendapatan yang mencerminkan keadilan ekonomi, sekaligus menciptakan perilaku masyarakat kota untuk selalu bertindak ekonomi.
9. Membina dan menumbuhkembangkan pengusaha dan perusahaan mikro, kecil, dan menengah menjadi usahawan formal dan maju, sehingga mampu berintegrasi dengan kegiatan ekonomi sektor modern.  
Untuk itu, berbagai kebijakan ekonomi kota diarahkan untuk mendorong relokasi pedagang informal dari kawasan-kawasan terlarang ke kawasan-kawasan yang telah diperuntukkan, disertai pembinaan kemampuan mengelola usaha.
10. Mendorong dunia usaha mengembangkan lembaga keuangan mikro sebagai sumber pembiayaan usaha kecil menengah dan mikro; Mendorong terbentuknya lembaga independen yang bergerak dalam pengembangan usaha mikro dan usaha kecil menjadi usahawan modern dan menengah; Mendorong dan memfasilitasi usaha kecil menengah dan besar melakukan pertemuan bisnis (business gathering), agar dapat saling bersinergi dalam mengembangkan usaha masing-masing.
11. Meningkatkan kedudukan, fungsi, peran dan kontribusi usaha mikro kecil menengah serta koperasi dalam pasar lokal, regional, nasional, bahkan ekspor. Untuk itu, pembinaan terhadap usaha kecil menengah dan koperasi diarahkan kepada usaha meningkatkan efisiensi usaha mikro kecil menengah dan koperasi, pengembangan produk dan kualitas, informasi pasar, bantuan keuangan, serta bantuan rekayasa teknologi.

12. Memanfaatkan peluang keterbukaan ekonomi secara global, dan regional, untuk memperluas pasar-pasar produk unggulan yang dihasilkan, melalui peningkatan efisiensi dan daya saing, khususnya oleh sektor usaha mikro kecil menengah dan koperasi, dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi lokal dan regional.

### **C. Mewujudkan Masyarakat Kota yang Cerdas dan Bermartabat**

Keberhasilan dan manfaat pembangunan kota dalam 20 tahun ke depan, akan dapat dicapai apabila seluruh komponen pembangunan kota bekerja keras, bahkan lebih dari yang telah dikerjakan sebelumnya. Hal tersebut juga harus didukung kemampuan merebut dan menciptakan persaingan, bekerjasama dengan berbagai pihak secara harmonis, serta tetap menjaga kepribadian dan jati diri warga agar tetap bermartabat. Untuk mewujudkan masyarakat kota yang cerdas dan bermartabat, pembangunan diarahkan pada:

1. Peningkatan pembangunan pendidikan masyarakat melalui perencanaan pendidikan, pembaharuan sistem pendidikan termasuk kurikulum, mengembangkan kualitas sumber daya manusia pendidikan yang terarah, terpadu dan menyeluruh agar berdaya saing global, meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan IPTEK, penentuan standard baku pencapaian keberhasilan pembelajaran, serta memberdayakan lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap dan perilaku bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, penyelenggaraan proses pembelajaran modern berbasis teknologi dan jaringan, penyelenggaraan sistem manajemen pendidikan yang adaptif, efektif dan efisien, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, peningkatan mutu, kemampuan dan hasil guna dari program pendidikan kesehatan (*health education*) dan kesehatan berbasis masyarakat (*community based*), perwujudan kesehatan untuk semua (*health for all*) melalui penciptaan lingkungan sehat, peningkatan status kesehatan ibu, bayi, balita, anak dan keluarga, peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja, penurunan kesakitan dan kematian akibat penyakit menular seksual serta peningkatan gerakan Keluarga Berencana.
3. Peningkatan kualitas penduduk kota melalui pengendalian jumlah, laju pertumbuhan, peningkatan kualitas serta mobilitasnya, peningkatan administrasi kependudukan yang modern, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan dan peningkatan status perempuan, perlindungan terhadap anak dan remaja, serta pemberian pembinaan terhadap lansia, serta perencanaan kependudukan yang baik.
4. Peningkatan perilaku masyarakat yang kreatif dan produktif melalui pemberdayaan, peningkatan modal sosial dan modal intelektual, serta perlindungan kebebasan yang lebih luas bagi masyarakat untuk melakukan gagasan-gagasan, inisiatif yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraannya, memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk terlibat dalam perumusan kebijakan umum, akses pembiayaan, dan yang lainnya, termasuk membangun karakter yang mendorong terbentuknya kemandirian.

### **D. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Kota yang Modern dan Asri**

Kota Tebing Tinggi dalam kedudukannya sebagai sebuah kota, harus terus berkembang seiring perubahan dan kemajuan zaman. Berbagai infrastruktur harus terus ditingkatkan baik kebutuhan maupun kualitasnya. Begitu pula halnya dengan

fasilitas dan utilitas umum yang harus selalu ditingkatkan kapasitas dan manfaatnya. Pada sisi lain, terbatasnya ruang kota mengharuskan perlunya penataan dan manajemen kota yang lebih berkualitas sehingga pemanfaatan ruang kota lebih efisien. Demikian pula halnya dengan degradasi kualitas lingkungan hidup yang sudah sangat mengkhawatirkan semakin menguatkan kesadaran untuk merubah paradigma pembangunan yang cenderung berorientasi pada eksploitasi alam yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan keseimbangan dan pelestarian lingkungan hidup, menjadi paradigma pembangunan berkelanjutan, yaitu konsep pembangunan yang mengedepankan fungsi keseimbangan dan lingkungan hidup. Oleh karena itu untuk mewujudkan sarana dan prasarana kota yang modern dan asri pembangunan jangka panjang daerah diarahkan pada:

1. Perintisan dan perwujudan Good Governance yang diarahkan untuk mewujudkan lingkungan kota yang maju dan asri, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial ekonominya, melalui upaya sungguh-sungguh dan sistematis dalam menerapkan dimensi konseptual dan praktis pelaksanaan *Sustainable Urban Economy, Sustainable Urban Society, Sustainable Urban Shelter, Sustainable Urban Environmental, Sustainable Urban Access, Sustainable Urban Life, and Sustainable Urban Democracy*.
2. Pembangunan Pusat Kota dan Central Business District (CBD) sebagai *landmark* Kota dengan fungsi pusat pelayanan jasa perdagangan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana dasar dan penunjang yang modern, pusat pertemuan dan distribusi (stasiun utama) *mass rapid transportation*, disertai dengan penyediaan ruang publik yang memadai, antara lain hutan kota dan pusat pemerintahan. Perekonomian kota sangat tergantung pada wilayah hinterlandnya, yaitu seberapa jauh masyarakat luar kota ingin memanfaatkan jasa perdagangan dan jasa lainnya yang terdapat di kota Tebing Tinggi.
3. Pengelolaan Tata Ruang melalui penyusunan perencanaan kota yang berkualitas, pelaksanaan pemanfaatan rencana tata ruang kota yang telah ditetapkan secara berkelanjutan dan transparan, pembangunan pertamanan dan ruang terbuka hijau, pengadaan lahan untuk aktifitas pemerintahan, serta penataan sarana penunjang perkotaan seperti reklame, sektor informal dan sebagainya. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka 30 % dari ruang kota akan dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
4. Pengembangan sarana dan prasarana perkotaan melalui sinkronisasi pembangunan sarana dan prasarana, penataan manajemen pengelolaan sarana dan prasarana, pembangunan sistem transportasi kota yang diarahkan untuk (a) meningkatkan aksesibilitas dalam pergerakan barang dan orang dari dan ke Kota Tebing Tinggi, (b) Meningkatkan kemudahan pengangkutan barang-barang bahan baku dan hasil produksi guna mendorong pertumbuhan ekonomi Kota, (c) menciptakan pemerataan aksesibilitas antar kawasan bagian wilayah kota, dan (d) meningkatkan kenyamanan, keamanan, kecepatan pelayanan transportasi.
5. Penataan sistem jaringan jalan dan sistem pergerakan lalu lintas angkutan umum untuk mendukung Pelayanan Sistem Angkutan Umum Transportasi Perkotaan Terpadu (SAUTPT), yang ditekankan pada upaya keterpaduan sistem pelayanan angkutan umum; aksesibilitas pertukaran (*interchange*) moda yang tinggi, seperti moda angkutan jalan raya dengan moda kereta api (stasiun). Akan ditingkatkan kualitas dan kapasitas jalan *inner* dan *outer ringroad* Tebing Tinggi.
6. Pengembangan pelayanan penyediaan air bersih diarahkan untuk mendorong upaya pihak swasta dalam peningkatan kapasitas produksi, perluasan wilayah pelayanan, kualitas air bersih dan peningkatan kepuasan konsumen, serta

minimalisasi kehilangan air (*unaccounted for water*) yang dilakukan melalui dukungan dan fasilitasi upaya-upaya pengembangan sumber-sumber air baku baru.

7. Pengendalian banjir yang diarahkan untuk mengeliminir penyebab banjir yang disebabkan oleh manusia dan melakukan rekayasa penanggulangan penyebab alam, yang dilakukan dengan 4 (empat) strategi dasar untuk pengelolaan daerah banjir yang meliputi (a) modifikasi kerentanan dan kerugian banjir (penentuan zona atau pengaturan tata guna lahan); (b) pengaturan peningkatan kapasitas alam untuk dijaga kelestariannya seperti penghijauan dan sumur resapan (baik individual maupun komunal); (c) modifikasi dampak banjir dengan penggunaan teknik mitigasi dan penghindaran banjir (*flood protection*); serta (d) modifikasi banjir yang terjadi (pengurangan) dengan bangunan pengontrol (*waduk*) atau normalisasi sungai.  
Akan diatur sempadan sungai sehingga setidaknya 50 meter dari dua sisi sempadan sungai menjadi RTH.
8. Pembangunan sistem pengelolaan persampahan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam hal pengangkutan sampah yang tepat waktu dan termaksimalkannya rotasi pengangkutan timbunan sampah. TPA Regional di desa Sukajadi akan ditata sebagai TPA yang memenuhi syarat dan ramah lingkungan.
9. Peningkatan pelayanan sistem jaringan sanitasi (*sewerage*) air limbah domestik yang diarahkan untuk pengembangan kesadaran masyarakat dan developer untuk menggunakan teknologi sederhana pembuangan dan pengolahan air limbah setempat (*on site*) di beberapa kawasan yang memungkinkan serta pengembangan jaringan pembuangan terpusat (*off site*) terutama di kawasan pemukiman padat maupun pusat-pusat permukiman dan jasa komersil yang baru atau akan tumbuh.
10. Peningkatan kualitas, kuantitas dan keragaman sarana perkotaan yang diarahkan untuk meningkatkan kelengkapan sarana ekonomi, pelayanan umum dan sosial agar memenuhi standar minimal ketersediaan fasilitas kota modern yang maju dan handal, melalui pembangunan dan penyebaran sarana lingkungan, pembangunan sarana rekreasi, perdagangan, dan sarana telekomunikasi seperti gedung teater, pusat rekreasi keluarga, komplek/kawasan olahraga terpadu dan sebagainya. Pembangunan sarana perkotaan juga akan meliputi perbaikan kawasan kumuh, pembangunan jalan setapak, perbaikan perumahan dan permukiman, penyehatan lingkungan, penyediaan air bersih, dll program yang terkait dengan lingkungan permukiman.
11. Pengembangan sarana perekonomian, diarahkan untuk meningkatkan daya saing kota sebagai pusat jasa perdagangan serta mendorong tumbuhnya iklim usaha dengan pembangunan fasilitas yang modern, lengkap dan asri, melalui pembangunan pasar modern dan tradisional yang terstruktur secara merata di tiap Kecamatan.
12. Pengembangan pembangunan perumahan dan permukiman yang sehat dan terjangkau melalui (a) mendorong pembangunan perumahan real estate yang dilengkapi fasilitas lingkungan yang memenuhi standar kota modern dan maju; (b) pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah dengan sistem, *kasiba/lisiba*, rumah susun, rumah susun sederhana sewa (*rusunawa*) baik oleh Pemerintah maupun swasta; (c) pembangunan rumah untuk pegawai negeri dan buruh; (d) fasilitasi kredit perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, (e) penataan permukiman yang sehat dan layak huni, (f)

penataan kawasan kumuh melalui Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT/UIDP) atau sejenisnya, Kegiatan pengembang diharapkan sekaligus turut menambah tersedianya prasarana perkotaan.

13. Menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara aktif dalam pembangunan sarana dan prasarana kota, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap pengendalian/pengawasan/perawatan.
14. Peningkatan kualitas lingkungan hidup kota melalui pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten.

## **IV.2 TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG**

Untuk mencapai sasaran pokok pembangunan kota jangka panjang sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu, maka pembangunan jangka panjang yang berjangka waktu 20 tahun dilakukan secara bertahap yang masing-masing tahap berjangka waktu 5 tahun. Masing-masing tahap dikenal sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D). Dengan demikian, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kota Tebing Tinggi seluruhnya terdiri dari 4 RPJM-D dan masing-masing RPJM-D memiliki skala prioritas yang sifatnya berkesinambungan secara utuh dan konsisten menuju tercapainya tujuan pembangunan jangka panjang sebagaimana digambarkan oleh Visi dan Misi yang telah depakati.

### **A. RPJM-D ke 1 (2006-2010)**

Berdasarkan kondisi eksternal dan internal Kota Tebing Tinggi, situasi Provinsi Sumatera Utara serta situasi nasional dengan berbagai kecenderungan yang terlihat baik yang bersifat positif maupun negatif dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan kemasyarakatan maka dalam pembangunan kota jangka menengah periode pertama fokus pembangunan perlu ditekankan pada penciptaan perekonomian kota yang tangguh.

Dalam tahap ini, kesejahteraan masyarakat harus mampu menunjukkan ukuran-ukuran nyata seperti tersedianya lapangan kerja yang berkualitas, meningkatnya derajat konsumsi akibat peningkatan pekerjaan dan pendapatan, meningkatnya derajat pendidikan akibat tersedianya sarana pendidikan formal dan non-formal yang berkualitas didukung oleh *e-education system* yang semakin luas, tercukupinya pasokan listrik, air, bahan pangan bermutu dan bergizi secara merata, mantapnya sistem pengelolaan kesehatan, sistem jaminan sosial dan lain-lain. Hal-hal yang masih dinilai lemah perlu diperbaiki, ditumbuhkan dan dimantapkan dalam tahap ini.

Perekonomian Kota Tebing Tinggi yang tangguh dan dinamis yang merupakan fokus utama pembangunan RPJM-D ke-1 diharapkan dapat membawa Kota Tebing Tinggi menjadi kota yang tangguh yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Kondisi ini ditandai dengan munculnya pusat-pusat perdagangan yang terintegrasi dan modern serta didukung oleh kenakearagaman fasilitas hiburan, olahraga, pusat kesenian dan budaya.

Struktur perekonomian juga diharapkan yang semakin tangguh dan dinamis ditandai dengan daya saing perekonomian kota yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara sektor perdagangan, industri dan jasa. Prasarana perekonomian juga telah tertata dengan baik. Kondisi ini juga didukung oleh sumberdaya manusia dan kemampuan iptek yang semakin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha-usaha lokal yang dapat bersaing dengan usaha-usaha berskala regional. Daya saing yang tinggi dari dunia usaha akan melahirkan pertumbuhan ekonomi kota yang semakin berkualitas

hingga pendapatan perkapita terus meningkat serta menurunnya secara signifikan tingkat pengangguran dan kemiskinan kota.

Dikaitkan dengan RTRW kota Tebing Tinggi yang ditetapkan hingga tahun 2028, maka pada periode ini direncanakan dapat dicapai  $\pm 15\%$  dari target RTRW tersebut. Rincian target dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Penataan Ruang**

Penetapan Pusat Kota dan 4 Bagian Wilayah Kota (BWK) yaitu: BWK Utara, BWK Tenggara, BWK Barat Daya dan BWK Barat. Pada RPJMD-1 dilakukan Pembinaan Pusat Kota untuk dapat memenuhi fungsi yang ditetapkan.

**b. Sarana Permukiman**

Sesuai dengan target RTRW hingga tahun 2028 dibutuhkan penambahan kavling perumahan seluas 1.705.592 Ha. Hingga akhir RPJMD-1 ditargetkan dicapai  $\pm 15\%$  yaitu 255.839 Ha.

**c. Sarana Pendidikan**

Sesuai dengan target RTRW hingga tahun 2028 dibutuhkan penambahan sarana pendidikan: TK 146 unit, SD 66 unit, SMP 13 unit, SMU 10 unit, SMK Kejuruan 7 unit dan Perguruan Tinggi 2 unit. Hingga akhir RPJMD-1 ditargetkan dicapai  $\pm 15\%$  yaitu: TK 22 unit, SD 10 unit, SMP 2 unit, SMU 1 unit dan SMK Kejuruan 1 unit.

**d. Sarana Kesehatan**

Sesuai dengan target RTRW hingga tahun 2028 dibutuhkan penambahan sarana kesehatan: Puskesmas Pembantu 15 unit, Rumah Bersalin 4 unit dan Laboratorium 1 unit. Hingga akhir RPJMD-1 ditargetkan dicapai  $\pm 15\%$  yaitu: Puskesmas Pembantu 2 unit dan Rumah Bersalin 1 unit.

**e. Jaringan Transportasi**

Di kota Tebing Tinggi ada 14 jalan utama dan sesuai dengan target RTRW hingga tahun 2028, ada 10 jalan utama yang ditingkatkan ataupun diroboh fungsinya. Hingga akhir RPJMD-1 ditargetkan dicapai  $\pm 15\%$  yaitu: Simp. Jl. AMD – Jl. Letda Sujono dan sebagian Simp. Jl. Belibis – Jl. Kapten Tendean.

**f. Jaringan Listrik**

Sesuai dengan target RTRW hingga tahun 2028 dibutuhkan penambahan daya sebesar 18.661.700 Watt. Hingga akhir RPJMD-1 ditargetkan dicapai  $\pm 15\%$  yaitu 2.799.255 Watt.

**g. Jaringan Telekomunikasi**

Sesuai dengan RTRW hingga tahun 2028 kebutuhan SST adalah 5.467 unit. Tidak ditargetkan penambahan SST karena masyarakat makin banyak yang beralih ke telepon seluler (HP)

**h. Pelayanan Air Minum**

Sesuai dengan target RTRW hingga tahun 2028 dibutuhkan penambahan kapasitas (debit air) sebesar 179 l/det. Hingga akhir RPJMD-1 ditargetkan dicapai  $\pm 15\%$  yaitu 27 l/det.

**i. Jaringan Drainase**

Di kota Tebing Tinggi terdapat 5 saluran utama yang perlu dinormalisasi ataupun ditingkatkan fungsinya. Sesuai dengan target RTRW hingga tahun 2028 dibutuhkan normalisasi 13 Km dan Pembuatan Lining/ Talud 17 Km. Hingga akhir RPJMD-1 ditargetkan dicapai  $\pm 15\%$  yaitu normalisasi 2 Km dan lining/ talud 3 Km. Proyek direncanakan untuk sebagian S. Padang.

**j. Penanganan Persampahan**

Sesuai dengan target RTRW hingga tahun 2028 dibutuhkan penambahan areal baru TPA seluas 3,5 Ha, TPS 63 unit dan Kontainer 16 unit. Hingga akhir RPJMD-1 ditargetkan dicapai  $\pm 15\%$  yaitu: lokasi TPA yang baru sudah diperoleh dan ada 2 Ha yang sudah dapat dimanfaatkan, penambahan 9 TPS dan 2 Kontainer.

**k. Alokasi Ruang**

**k.1 Kawasan Lindung**

Yang termasuk kawasan lindung adalah: Kawasan Perlindungan Setempat (Sempadan Sungai, Hutan Kota, Jalur Hijau-Jalur Kereta Api, Makam dan TPA). Kawasan Lindung ini akan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik. Sesuai dengan target RTRW hingga tahun 2028 dibutuhkan RTH seluas 798,448 Ha. Hingga akhir RPJMD-1 ditargetkan dicapai 119,767 Ha.

**k.2 Kawasan Budidaya**

**a). Kawasan Jasa Perdagangan**

Yang termasuk kawasan perdagangan adalah: kawasan untuk warung, toko dan pasar. Sesuai dengan target RTRW hingga tahun 2028 dibutuhkan penambahan kawasan perdagangan seluas 35.331 m<sup>2</sup>. Hingga akhir RPJMD-1 ditargetkan dicapai  $\pm 15\%$  yaitu 5.300 m<sup>2</sup>.

**b). Kawasan Jasa Perkantoran**

Sesuai dengan target RTRW hingga tahun 2028 akan ada kawasan perkantoran pusat di Jl. Gunung Leuser dan di masing-masing BWK. Hingga akhir RPJMD-1 ditargetkan dicapai  $\pm 15\%$  yaitu pembenahan pada lokasi Perkantoran Pusat.

**c). Kawasan Jasa Pergudangan**

Sesuai dengan target RTRW hingga tahun 2028 akan ada kawasan pergudangan. Kawasan ini direncanakan di sekitar kawasan BWK Utara dan BWK Tenggara. Hingga akhir RPJMD-1 ditargetkan dicapai  $\pm 15\%$  yaitu telah diperolehnya lokasi tersebut.

**d). Kawasan Industri**

Saat ini lokasi industri di kota Tebing Tinggi letaknya berserakan. Sesuai dengan target RTRW hingga tahun 2028 dibutuhkan pembangunan 1 kawasan industri Lokasi ini diarahkan ke BWK Tenggara kota Tebing Tinggi. Hingga akhir RPJMD-1 ditargetkan dicapai  $\pm 15\%$  yaitu telah diperolehnya lokasi tersebut.

### k.3. Kawasan Strategis Kota

Sesuai dengan RTRW kawasan strategis kota diarahkan ke kawasan tepi sungai Padang dan Bahilang di BWK Utara Kota Tebing Tinggi. Hingga akhir RPJMD-1 ditargetkan telah selesai dibuat Rencana Detail tata Ruang (RDTR) atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) untuk dua kawasan tersebut.

### k.4 Ruang Terbuka Non Hijau

Ruang terbuka non hijau meliputi penataan gazebo di kawasan Terminal Bandar Kajum, revitalisasi sarana lapangan olah raga dan taman kota, serta revitalisasi stasiun kereta api.

### k.5 Areal Cadangan dan Evakuasi Bencana

Areal cadangan pengembangan berfungsi sebagai antisipasi kebutuhan lahan dimasa yang akan datang sekaligus berperan sebagai kawasan resapan air. Sementara ruang evakuasi bencana diarahkan dengan memanfaatkan sarana lapangan olah raga dan sarana gedung pertemuan milik pemerintah.

## B. RPJM-D ke 2 (2011-2015)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai lanjutan dari RPJM-D ke-1 maka RPJM-D ke-2 difokuskan pada perwujudan tata pemerintahan daerah yang akuntabel, demokratis dan berlandaskan hukum guna melindungi kepentingan masyarakat di atas kemajemukan menuju masyarakat madani yang sejahtera dengan tetap memelihara dan menunjang pertumbuhan sektor-sektor lain yang telah dicapai pada pembangunan RPJM- D ke-1.

Tata pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi terjadinya iklim yang kondusif tidak saja bagi pelayanan publik tetapi juga sekaligus menjadi insentif bagi dunia usaha untuk dapat melakukan kegiatan dengan baik. Kualitas pelayanan umum yang ditingkatkan tidak terbatas hanya pada jasa pelayanan umum oleh Pemerintah Kota kepada warga kota, tetapi juga yang diselenggarakan pihak swasta, dengan atau tanpa pembayaran, guna memenuhi kebutuhan dan/atau kepentingan masyarakat. Pemberian pelayanan umum prima, yang diwujudkan melalui penyederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan yang merata, ketepatan waktu terhadap prosedur/tata cara pelayanan umum. Di sisi lain, penataan manajemen pelayanan umum, dengan cara mendorongnya dalam iklim kompetisi, berorientasi kepada kebutuhan pelayanan masyarakat, akuntabilitas pelayanan, memposisikan pelayanan umum sebagai hak dan kewajiban warga kota, tidak diskriminatif dan demokratis.

Kesejahteraan masyarakat yang komponen-komponennya adalah tingkat pendidikan, pendapatan perkapita, pemerkerjaan (*employment*), kesehatan dan lain-lain dicerminkan dalam Indeks Pembangunan Manusia. Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia maka strategi yang perlu dikembangkan dalam tahapan ini ialah peningkatan pendapatan perkapita yang sekaligus penurunan angka kemiskinan dan pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (melalui percepatan investasi) sebagaimana yang telah dicapai pada tahap I, pengembangan lembaga jaminan sosial, peningkatan kualitas pendidikan masyarakat yang didukung oleh pemantapan pelaksanaan pendidikan formal, peningkatan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, peningkatan kesetaraan gender, perlindungan anak, serta pengendalian pertumbuhan penduduk.

Dikaitkan dengan RTRW kota Tebing Tinggi, maka pada periode ini direncanakan dapat dicapai  $\pm 20\%$  atau kumulatif dengan RPJMD-1 menjadi sebesar  $\pm 35\%$ . Rincian target adalah sebagai berikut:

**a. Penataan Ruang**

Setelah selesai pembenahan Pusat Kota, maka pada periode ini dilakukan pembenahan BWK Utara agar dapat memenuhi fungsi yang ditetapkan RTRW.

**b. Sarana Permukiman**

Sesuai dengan target RTRW hingga tahun 2028 dibutuhkan penambahan kavling perumahan seluas 1.705.592 Ha. Pada RPJMD-2 ditargetkan penambahan  $\pm 20\%$  sehingga secara kumulatif dengan RPJMD-1 dicapai  $\pm 35\%$ . Penambahan kavling pada periode ini ditargetkan 341.118 Ha.

**c. Sarana Pendidikan**

Sesuai dengan target RTRW hingga tahun 2028 dibutuhkan penambahan sarana pendidikan: TK 146 unit, SD 66 unit, SMP 13 unit, SMU 10 unit, SMK Kejuruan 7 unit dan Perguruan Tinggi 2 unit. Pada RPJMD-2 ditargetkan tambahan  $\pm 20\%$  yaitu: TK 29 unit, SD 13 unit, SMP 3 unit, SMU 2 unit dan SMK Kejuruan 1 unit.

**d. Sarana Kesehatan**

Sesuai dengan target RTRW hingga tahun 2028 dibutuhkan penambahan sarana kesehatan: Puskesmas Pembantu 15 unit, Rumah Bersalin 4 unit dan Laboratorium 1 unit. Pada RPJMD-2 ditargetkan tambahan  $\pm 20\%$  yaitu: Puskesmas Pembantu 3 unit dan Rumah Bersalin 1 unit.

**e. Jaringan Transportasi**

Di kota Tebing Tinggi ada 14 jalan utama dan sesuai dengan target RTRW hingga tahun 2028 ada 10 jalan utama yang ditingkatkan ataupun diroboh fungsinya. Hingga akhir RPJMD-1 semestinya telah dicapai  $\pm 15\%$  yaitu: Jl. AMD-Jl. Letda Sujono dan sebagian Simp. Jl. Belibis-Jl. Kapten Tendean. Pada RPJMD-2 ditargetkan tambahan  $\pm 20\%$  yaitu: Lanjutan Simp. Jl. Belibis-Jl. Kapten Tendean dan Simp. Jl. Belibis-Jl. IH Juanda.

**f. Jaringan Listrik**

Sesuai dengan target RTRW hingga tahun 2028 dibutuhkan penambahan daya sebesar 18.661.700 Watt. Hingga akhir RPJMD-1 semestinya telah dicapai  $\pm 15\%$  yaitu 2.799.255 Watt. Pada RPJMD-2 ditargetkan penambahan daya sebesar  $\pm 20\%$  atau 3.732.340 Watt.

**g. Jaringan Telekomunikasi**

Sesuai dengan RTRW hingga tahun 2028 kebutuhan SST adalah 5.467 unit. Tidak ditargetkan penambahan SST karena masyarakat makin banyak yang beralih ke telepon seluler (HP)

**h. Pelayanan Air Minum**

Sesuai dengan target RTRW hingga tahun 2028 dibutuhkan penambahan kapasitas (debit air) sebesar 179 l/det. Hingga akhir RPJMD-1 semestinya telah dicapai  $\pm 15\%$  atau 27 ltr/det. Pada RPJMD-2 ditargetkan penambahan daya sebesar  $\pm 20\%$  yaitu 37 ltr/det.

### **i. Jaringan Drainase**

Di kota Tebing Tinggi terdapat 5 saluran utama yang perlu dinormalisasi ataupun ditingkatkan fungsinya. Sesuai dengan target RTRW hingga tahun 2028 dibutuhkan normalisasi 13 Km dan Pembuatan Lining/Talud 17 Km. Hingga akhir RPJMD-1 semestinya telah dicapai  $\pm 15\%$  yaitu normalisasi 2 Km dan lining/talud 3 Km. Proyek direncanakan untuk sebagian S. Padang. Pada RPJMD-2 ditargetkan penambahan normalisasi 2,6 Km dan lining/talud 3,4 Km. Proyek direncanakan untuk menyelesaikan S. Padang.

### **j. Penanganan Persampahan**

Sesuai dengan target RTRW hingga tahun 2028 dibutuhkan penambahan areal baru TPA seluas 3,5 Ha, TPS 63 unit dan Kontainer 16 unit. Hingga akhir RPJMD-1 semestinya telah dicapai  $\pm 15\%$  yaitu: lokasi TPA yang baru sudah diperoleh dan ada 2 Ha yang sudah dapat dimanfaatkan, penambahan 9 TPS dan 2 Kontainer. Pada RPJMD-2 ditargetkan melanjutkan pembangunan TPA sehingga yang dapat dimanfaatkan bertambah 1 Ha menjadi 3 Ha, penambahan 13 TPS dan 3 unit Kontainer. Pada RPJMD-2 ini juga sudah dipertimbangkan pengembangan TPA regional bersama Kabupaten Serdang Bedagai sebagai antisipasi keterbatasan lahan serta pengelolaan sampah yang berorientasi pada konsep zero waste.

### **k. Alokasi Ruang**

#### **k.1. Kawasan Lindung**

Yang termasuk kawasan lindung adalah: Kawasan Perlindungan Setempat (Sempadan Sungai, Hutan Kota, Jalur Hijau-Jalur Kereta Api, Makam dan TPA). Kawasan Lindung ini akan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik. Sesuai dengan target RTRW hingga tahun 2028 dibutuhkan RTH seluas 3.843,81 Ha. Hingga akhir RPJMD-1 semestinya telah dicapai  $\pm 15\%$  yaitu 577 Ha. Pada tahap itu diutamakan pada sempadan sungai dan jalur kereta api. Pada RPJMD-2 ditargetkan penambahan  $\pm 20\%$  yaitu 769 Ha. Pada tahap ini diutamakan untuk melanjutkan sempadan sungai dan jalur kereta api dan pembangunan/perluasan taman kota.

#### **k.2. Kawasan Budidaya**

##### **a). Kawasan Jasa Perdagangan**

Yang termasuk kawasan perdagangan adalah: kawasan untuk warung, toko dan pasar. Sesuai dengan target RTRW hingga tahun 2028 dibutuhkan penambahan kawasan perdagangan seluas 35.331 m<sup>2</sup>. Hingga akhir RPJMD-1 semestinya telah dicapai  $\pm 15\%$  yaitu 5.300 m<sup>2</sup>. Pada tahap ini ditetapkan target penambahan sebesar  $\pm 20\%$  yaitu 7.066 m<sup>2</sup>.

##### **b). Kawasan Jasa Perkantoran**

Sesuai dengan target RTRW hingga tahun 2028 akan ada kawasan perkantoran pusat di Jl. Gunung Leuser dan di masing-masing BWK. Hingga akhir RPJMD-1 semestinya telah dicapai  $\pm 15\%$  yaitu pembenahan pada lokasi Perkantoran Pusat. Pada RPJMD-2 akan dilanjutkan dengan pembenahan pada BWK Utara.

c). Kawasan Jasa Pergudangan

Sesuai dengan target RTRW hingga tahun 2028 akan ada kawasan pergudangan. Kawasan ini direncanakan di sekitar kawasan BWK Utara dan BWK Tenggara. Hingga akhir RPJMD-1 semestinya telah dicapai  $\pm 15\%$  yaitu telah diperolehnya lokasi tersebut. Pada RPJMD-2 dilakukan pembenahan prasarana dasar pada lokasi tersebut dan sebagian gudang sudah mulai dibangun.

d). Kawasan Industri

Saat ini lokasi industri di kota Tebing Tinggi letaknya berserakan. Sesuai dengan target RTRW hingga tahun 2028 dibutuhkan pembangunan 1 kawasan industri Lokasi ini diarahkan ke BWK Tenggara kota Tebing Tinggi. Hingga akhir RPJMD-1 ditargetkan dicapai  $\pm 15\%$  yaitu telah diperolehnya lokasi tersebut. Pada RPJMD-2 dilakukan pembenahan prasarana dasar pada lokasi tersebut dan sebagian lokasi sudah mulai dibangun.

k.3 Kawasan Strategis Kota

Sesuai dengan RTRW kawasan strategis kota diarahkan ke kawasan tepi sungai Padang/sungai Bahilang BWK Utara.

Hingga akhir RPJMD-1 semestinya telah selesai dibuat Rencana Detail tata Ruang (RDTR) atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) untuk dua kawasan tersebut. Pada RPJMD-2 dilakukan pembenahan prasarana dasar pada lokasi dimaksud.

**C. RPJM-D ke 3 (2016-2020)**

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai lanjutan dari RPJM-D ke-2 maka RPJM-D ke-3 difokuskan pada perwujudan prasarana dan sarana kota yang modern dan asri dengan tetap memelihara hasil pembangunan yang telah dicapai pada pembangunan RPJM- D ke-1 dan ke-2.

Hasil pembangunan yang dicapai pada RPJMD sebelumnya sangat perlu didukung oleh tersedianya prasarana dan sarana sosial serta ekonomi yang modern dan asri, khususnya di sektor perhubungan, pendidikan, kesehatan secara terintegrasi. Prasarana yang modern juga akan mendorong tumbuh kembangnya kawasan perumahan dan permukiman yang sehat, adil dan asri, serta adanya kawasan perkantoran baru yang terintegrasi dengan kawasan perdagangan dan kawasan sosial lainnya.

Ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan yang sesuai dengan tata ruang ditandai dengan berkembangnya jaringan dan moda transportasi kota, terpenuhinya pasokan energi listrik yang dapat menjadi insentif bagi dunia usaha dan penyediaan air minum sesuai dengan standar kesehatan guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, pemenuhan kebutuhan akan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana dasar pendukung terus meningkat yang akhirnya mewujudkan kota yang sehat dan berkelanjutan.

Dikaitkan dengan RTRW kota Tebing Tinggi, maka pada periode RPJMD-1 telah dicapai  $\pm 15\%$ , pada periode RPJMD-2 telah dicapai  $\pm 20\%$  dan pada periode ini direncanakan dapat dicapai  $\pm 25\%$  atau kumulatif dengan RPJMD sebelumnya sebesar  $\pm 60\%$ . Rincian target adalah sebagai berikut:

**a. Penataan Ruang**

Setelah selesai pembenahan Pusat Kota dan pembenahan BWK Utara, maka pada periode ini adalah pembenahan BWK Tenggara agar dapat memenuhi fungsi yang ditetapkan RTRW.

**b. Sarana Permukiman**

Sesuai dengan target RTRW hingga tahun 2028 dibutuhkan penambahan kavling perumahan seluas 1.705.592 Ha. Hingga akhir RPJMD-2 semestinya telah dilakukan penambahan secara kumulatif  $\pm 35 \%$ . Penambahan kavling pada periode ini ditargetkan  $\pm 25 \%$  atau sebesar 426.398 Ha.

**c. Sarana Pendidikan**

Sesuai dengan target RTRW hingga tahun 2028 dibutuhkan penambahan sarana pendidikan: TK 146 unit, SD 66 unit, SMP 13 unit, SMU 10 unit, SMK Kejuruan 7 unit dan Perguruan Tinggi 2 unit. Pada akhir RPJMD-2 semestinya telah selesai dibangun  $\pm 35 \%$ . Pada periode ini akan dilakukan penambahan sebanyak 25 % yaitu: TK 37 unit, SD 17 unit, SMP 3 unit, SMU 3, SMK Kejuruan 2 unit dan Perguruan Tinggi 1 unit.

**d. Sarana Kesehatan**

Sesuai dengan target RTRW hingga tahun 2028 dibutuhkan penambahan sarana kesehatan: Puskesmas Pembantu 15 unit, Rumah Bersalin 4 unit dan Laboratorium 1 unit. Hingga akhir RPJMD-2 semestinya telah selesai dibangun tambahan  $\pm 35 \%$ . Pada periode ini dilakukan penambahan sebanyak  $\pm 25 \%$ , yaitu: Puskesmas Pembantu 4 unit dan Rumah Bersalin 1 unit.

**e. Jaringan Transportasi**

Di kota Tebing Tinggi ada 14 jalan utama dan sesuai dengan target RTRW hingga tahun 2028 ada 10 jalan utama yang ditingkatkan ataupun diroboh fungsinya. Hingga akhir RPJMD-2 semestinya telah dicapai  $\pm 35 \%$  yaitu: Jl. AMD-Jl. Letda Sujono, Simp. Jl. Belibis -Jl. Kapten Tendean dan Simp. Jl. Belibis-Jl. IH Juanda. Pada RPJMD-3 ditargetkan tambahan  $\pm 25 \%$  yaitu: Simp. Jl. H. Juanda-Jl. Gunung Leuser, Simp. Jl. Gunung Leuser-Jl. Sudirman dan Simp. Jl. A. Yani-Jl. Sei Lubuk Raya.

**f. Jaringan Listrik**

Sesuai dengan target RTRW hingga tahun 2028 dibutuhkan penambahan daya sebesar 18.661.700 Watt. Hingga akhir RPJMD-2 semestinya telah dicapai  $\pm 35 \%$ . Pada RPJMD-2 ditargetkan penambahan daya sebesar  $\pm 25 \%$  atau 4.665.425 Watt.

**g. Jaringan Telekomunikasi**

Sesuai dengan RTRW hingga tahun 2028 kebutuhan SST adalah 5.467 unit. Tidak ditargetkan penambahan SST karena masyarakat makin banyak yang beralih ke telepon seluler (HP)

#### **h. Pelayanan Air Minum**

Sesuai dengan target RTRW hingga tahun 2028 dibutuhkan penambahan kapasitas (debit air) sebesar 179 ltr /det. Hingga akhir RPJMD-2 semestinya telah dicapai  $\pm 35 \%$  atau 64 ltr /det. Pada RPJMD-3 ditargetkan penambahan daya sebesar  $\pm 25 \%$  yaitu 45 ltr/det.

#### **i. Jaringan Drainase**

Di kota Tebing Tinggi terdapat 5 saluran utama yang perlu dinormalisasi ataupun ditingkatkan fungsinya. Sesuai dengan target RTRW hingga tahun 2028 dibutuhkan normalisasi 13 Km dan Pembuatan Lining/Talud 17 Km. Hingga akhir RPJMD-2 semestinya telah dicapai  $\pm 35 \%$  yaitu normalisasi 4,6 Km dan lining/talud 6,4 Km. Proyek semestinya telah menyelesaikan S. Padang. Pada RPJMD-3 ditargetkan normalisasi 3,25 Km dan lining/talud 4,25 Km. Proyek direncanakan untuk menyelesaikan S. Siberau dan S. Kelembah.

#### **j. Penanganan Persampahan**

Sesuai dengan target RTRW hingga tahun 2028 dibutuhkan penambahan areal baru TPA seluas 3,5 Ha, TPS 63 unit dan Kontainer 16 unit. Hingga akhir RPJMD-2 semestinya telah dicapai  $\pm 35 \%$  yaitu: lokasi TPA yang baru sudah dapat dimanfaatkan 3 Ha, penambahan 22 unit TPS dan 5 Kontainer. Pada RPJMD-3 ditargetkan melanjutkan pembangunan TPA sehingga seluruhnya 3,5 Ha dapat dimanfaatkan, penambahan 16 TPS dan 4 unit Kontainer.

#### **k. Alokasi Ruang**

##### **k.1 Kawasan Lindung**

Yang termasuk kawasan lindung adalah: Kawasan Perlindungan Setempat (Sempadan Sungai, Hutan Kota, Jalur Hijau-Jalur Kereta Api, Makam dan TPA). Kawasan Lindung ini akan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik.

Sesuai dengan target RTRW hingga tahun 2028 dibutuhkan RTH seluas 3.843,81 Ha. Hingga akhir RPJMD-2 semestinya telah dicapai  $\pm 35 \%$  yaitu 1.346 Ha. Pada tahap itu diutamakan pada sempadan sungai, jalur kereta api dan taman kota.

Pada RPJMD-3 ditargetkan penambahan  $\pm 25 \%$  yaitu 961 Ha. Pada tahap ini diutamakan untuk melanjutkan perluasan taman kota dan pembangunan sebagian Hutan Kota.

##### **k.2 Kawasan Budidaya**

###### **a). Kawasan Jasa Perdagangan**

Yang termasuk kawasan perdagangan adalah: kawasan untuk warung, toko dan pasar. Sesuai dengan target RTRW hingga tahun 2028 dibutuhkan penambahan kawasan perdagangan seluas 35.331 m<sup>2</sup>. Hingga akhir RPJMD-2 semestinya telah dicapai  $\pm 35 \%$ . Pada tahap ini ditetapkan target penambahan sebesar  $\pm 25 \%$  yaitu 8.833 m<sup>2</sup>

###### **b). Kawasan Jasa Perkantoran**

Sesuai dengan target RTRW hingga tahun 2028 akan ada kawasan perkantoran pusat di Jl. Gunung Leuser dan di masing-masing BWK. Hingga akhir RPJMD-2 semestinya telah dicapai  $\pm 35 \%$  yaitu pembenahan

pada lokasi Perkantoran Pusat dan BWK Utara. Pada RPJMD-3 akan dilanjutkan dengan pembenahan pada BWK Tenggara.

c). Kawasan Jasa Pergudangan

Sesuai dengan target RTRW hingga tahun 2028 akan ada kawasan pergudangan. Kawasan ini direncanakan di sekitar Jl. AMD. Hingga akhir RPJMD-2 semestinya telah dicapai  $\pm 35\%$  yaitu telah diperolehnya lokasi, pembenahan prasarana dasar dan sebagian lahan sudah dibangun. Pada RPJMD-3 dilakukan tambahan pembangunan gedung pergudangan.

d). Kawasan Industri

Saat ini lokasi industri di kota Tebing Tinggi letaknya berserakan. Sesuai dengan target RTRW hingga tahun 2028 dibutuhkan pembangunan 1 kawasan industri. Lokasi ini diarahkan ke BWK Tenggara kota Tebing Tinggi. Hingga akhir RPJMD-2 ditargetkan dicapai  $\pm 35\%$  yaitu telah diperolehnya lokasi, telah dilakukan pembenahan prasarana dasar pada lokasi tersebut dan sebagian lokasi sudah mulai dibangun. Pada RPJMD-3 dilakukan peningkatan prasarana dan melanjutkan pembangunan fisik bangunan industri.

k.3. Kawasan Strategis Kota

Sesuai dengan RTRW kawasan strategis kota diarahkan ke kawasan tepi sungai Padang/sungai Bahilang BWK Utara. Hingga akhir RPJMD-2 semestinya telah selesai dibuat Rencana Detail tata Ruang (RDTR) atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan telah dilakukan pembenahan prasarana dasar pada lokasi tersebut.

**D. RPJM-D ke 4 (2021-2025)**

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan dari RPJM-D ke-3, maka RPJM-D ke-4 ditujukan kepada perwujudan masyarakat kota yang cerdas dan bermartabat.

Pembangunan sumberdaya manusia yang menjadi fokus pembangunan dalam RPJP-D ke 4 hendaknya tidak diukur dari jumlah lulusan pendidikan formal baik pada tingkat sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah lanjutan tingkat atas dan lulusan Perguruan Tinggi semata karena walaupun hal tersebut penting, tidak representatif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tetapi perlu dilihat dari meningkatnya kerja produktif dalam sumberdaya ekonomi kota, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya derajat penyerapan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh masyarakat, semakin membaiknya interaksi sosial di masyarakat, serta terpeliharanya sumberdaya ekonomi kota secara berkelanjutan.

Sarana sekolah yang mencakup guru yang berkualitas, bangunan sekolah, laboratorium, kelengkapan administrasi pendidikan dan lain-lain perlu dipenuhi secara bertahap sehingga mendekati paling tidak kebutuhan minimal baik jumlah dan kualitasnya untuk menciptakan lulusan yang berkualitas sehingga tercapai wajib belajar 12 tahun. Peningkatan sumber daya manusia ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia Kota Tebing Tinggi menjadi 81, TPAK diperkirakan akan meningkat lebih dari 77% serta meningkatnya rata-rata lama sekolah menjadi lebih dari 12 tahun. Pada tahap ini, terciptanya *good governance* juga sudah harus dapat dirasakan oleh masyarakat secara signifikan. Sehubungan dengan itu pemanfaatan teknologi informasi juga sudah membudaya dalam semua aspek kehidupan masyarakat dan kegiatan pemerintahan utamanya dalam menjalankan pelayanan publik.

Dikaitkan dengan RTRW kota Tebing Tinggi, maka pada periode RPJM-1 telah dicapai  $\pm 15\%$ , pada periode RPJM-2 telah dicapai tambahan  $\pm 20\%$ , pada periode RPJM-3 telah dicapai tambahan  $\pm 25\%$  atau secara kumulatif telah dicapai  $\pm 60\%$ . Pada periode ini direncanakan dapat dicapai tambahan  $\pm 35\%$  sehingga kumulatif dengan RPJMD sebelumnya menjadi  $\pm 95\%$ . Rincian target adalah sebagai berikut:

**a. Penataan Ruang**

Setelah selesai pembenahan Pusat Kota, pembenahan BWK Utara, dan pembenahan BWK Tenggara; maka pada periode ini adalah pembenahan BWK Barat Daya dan BWK Barat agar dapat memenuhi fungsi yang ditetapkan RTRW. Dengan demikian seluruh target yang ditetapkan dalam RTRW telah terpenuhi.

**b. Sarana Permukiman**

Sesuai dengan target RTRW hingga tahun 2028 dibutuhkan penambahan kavling perumahan seluas 1.705.592 Ha. Hingga akhir RPJMD-3 semestinya telah dilakukan penambahan secara kumulatif  $\pm 60\%$ . Penambahan kavling pada periode ini ditargetkan  $\pm 35\%$  atau sebesar 596.957 Ha. Total yang terbangun sejak RPJMD-1 menjadi 1.620.312 Ha.

**c. Sarana Pendidikan**

Sesuai dengan target RTRW hingga tahun 2028 dibutuhkan penambahan sarana pendidikan: TK 146 unit, SD 66 unit, SMP 13 unit, SMU 10 unit, SMK Kejuruan 7 unit dan Perguruan Tinggi 2 unit. Pada akhir RPJMD-3 semestinya telah selesai dibangun  $\pm 60\%$ . Pada periode ini akan dilakukan penambahan sebanyak  $\pm 35\%$  yaitu: TK 51 unit, SD 23 unit, SMP 5 unit, SMU 4, SMK Kejuruan 2 unit dan Perguruan Tinggi 1 unit.

**d. Sarana Kesehatan**

Sesuai dengan target RTRW hingga tahun 2028 dibutuhkan penambahan sarana kesehatan: Puskesmas Pembantu 15 unit, Rumah Bersalin 4 unit dan Laboratorium 1 unit. Hingga akhir RPJMD-3 semestinya telah selesai dibangun tambahan  $\pm 60\%$ . Pada periode ini dilakukan penambahan sebanyak  $\pm 35\%$ , yaitu: Puskesmas Pembantu 5 unit, Rumah Bersalin 1 unit dan laboratorium 1 unit.

**e. Jaringan Transportasi**

Di kota Tebing Tinggi ada 14 jalan utama dan sesuai dengan target RTRW hingga tahun 2028 ada 10 jalan utama yang ditingkatkan ataupun dirobah fungsinya. Hingga akhir RPJMD-3 semestinya telah dicapai  $\pm 60\%$  yaitu: Jl. AMD-Jl. Letda Sujono, Simp. Jl. Belibis-Jl. Kapten Tendean, Simp. Jl. Belibis-Jl. IH Juanda, Simp. Jl. H. Juanda-Jl. Gunung Leuser, Simp. Jl. Gunung Leuser-Jl. Sudirman dan Simp. Jl. A. Yani-Jl. Sei Lubuk Raya. Pada RPJMD-4 ditargetkan tambahan  $\pm 35\%$  yaitu: Simp. Jl. Diponegoro-Jl. Sutoyo, Simp. Jl. Moh. Yamin-Jl. Sukarno Hatta dan Simp. Jl. Kapt. Tendean-Jl. Sudirman.

**f. Jaringan Listrik**

Sesuai dengan target RTRW hingga tahun 2028 dibutuhkan penambahan daya sebesar 18.661.700 Watt. Hingga akhir RPJMD-3 semestinya telah dicapai  $\pm 60\%$ . Pada RPJMD-4 ditargetkan penambahan daya sebesar  $\pm 35\%$  atau 6.531.595 Watt.

**g. Jaringan Telekomunikasi**

Sesuai dengan RTRW hingga tahun 2028 kebutuhan SST adalah 5.467 unit. Tidak ditargetkan penambahan SST karena masyarakat makin banyak yang beralih ke telepon seluler (HP)

**h. Pelayanan Air Minum**

Sesuai dengan target RTRW hingga tahun 2028 dibutuhkan penambahan kapasitas (debit air) sebesar 179 ltr/det. Hingga akhir RPJMD-3 semestinya telah dicapai  $\pm 60\%$  atau 109 ltr/det. Pada RPJMD-4 ditargetkan penambahan daya sebesar  $\pm 35\%$  yaitu 63 ltr/det.

**i. Jaringan Drainase**

Di kota Tebing Tinggi terdapat 5 saluran utama yang perlu dinormalisasi ataupun ditingkatkan fungsinya. Sesuai dengan target RTRW hingga tahun 2028 dibutuhkan normalisasi 13 Km dan Pembuatan Lining/Talud 17 Km. Hingga akhir RPJMD-3 semestinya telah dicapai  $\pm 60\%$  yaitu normalisasi 7,85 Km dan lining/talud 10,65 Km. Pada RPJMD-4 ditargetkan  $\pm 35\%$  yaitu normalisasi 4,55 Km dan lining/talud 5,95 Km. Proyek direncanakan untuk menyelesaikan S. Bahilang dan S. Sigiling.

**j. Penanganan Persampahan**

Sesuai dengan target RTRW hingga tahun 2028 dibutuhkan penambahan areal baru TPA seluas 3,5 Ha, TPS 63 unit dan Kontainer 16 unit. Hingga akhir RPJMD-3 semestinya telah dicapai  $\pm 60\%$  yaitu: lokasi TPA yang baru sudah dapat dimanfaatkan 3,5 Ha, penambahan 28 unit TPS dan 9 Kontainer. Pada RPJMD-4 ditargetkan melengkapi fasilitas di TPA, penambahan 22 TPS dan 6 unit Kontainer.

**k. Alokasi Ruang**

**k.1 Kawasan Lindung**

Yang termasuk kawasan lindung adalah: Kawasan Perlindungan Setempat (Sempadan Sungai, Hutan Kota, Jalur Hijau-Jalur Kereta Api, Makam dan TPA). Kawasan Lindung ini akan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik.

Sesuai dengan target RTRW hingga tahun 2028 dibutuhkan RTH seluas 3.843,81 Ha. Hingga akhir RPJMD-3 semestinya telah dicapai  $\pm 60\%$  atau 2.307 Ha. Pada RPJMD-4 ditargetkan penambahan  $\pm 35\%$  yaitu 1.345 Ha. Pada tahap ini diutamakan untuk melanjutkan perluasan taman kota dan pembangunan lanjutan Hutan Kota.

**k.2 Kawasan Budidaya**

**a). Kawasan Jasa Perdagangan**

Yang termasuk kawasan perdagangan adalah: kawasan untuk warung, toko dan pasar. Sesuai dengan target RTRW hingga tahun 2028 dibutuhkan penambahan kawasan perdagangan seluas 35.331 m<sup>2</sup>. Hingga akhir RPJMD-3 semestinya telah dicapai  $\pm 60\%$ . Pada tahap ini ditetapkan target penambahan sebesar  $\pm 35\%$  yaitu 12.366 m<sup>2</sup>.

b). Kawasan Jasa Perkantoran

Sesuai dengan target RTRW hingga tahun 2028 akan ada kawasan perkantoran pusat di Jl. Gunung Leuser dan di masing-masing BWK. Hingga akhir RPJMD-3 semestinya telah dicapai  $\pm 60\%$  yaitu pembenahan pada lokasi Perkantoran Pusat, BWK Utara dan BWK Tenggara. Pada RPJMD-4 akan dilanjutkan dengan pembenahan pada BWK Barat Daya dan BWK Barat.

c). Kawasan Jasa Pergudangan

Sesuai dengan target RTRW hingga tahun 2028 akan ada kawasan pergudangan. Kawasan ini direncanakan di sekitar Jl. AMD. Hingga akhir RPJMD-3 semestinya telah dicapai  $\pm 60\%$  yaitu telah diperolehnya lokasi, pembenahan prasarana dasar dan sebagian lahan sudah dibangun. Pada RPJMD-4 dilakukan tambahan pembangunan gedung sehingga kapasitas gudang makin meningkat.

d). Kawasan Industri

Saat ini lokasi industri di kota Tebing Tinggi letaknya berserakan. Sesuai dengan target RTRW hingga tahun 2028 dibutuhkan pembangunan 1 kawasan industri Lokasi ini diarahkan ke BWK Tenggara kota Tebing Tinggi. Hingga akhir RPJMD-3 semestinya telah dicapai  $\pm 60\%$  yaitu telah diperolehnya lokasi, telah dilakukan pembenahan prasarana dasar pada lokasi tersebut dan sebagian lokasi sudah mulai dibangun. Pada RPJMD-4 dilakukan peningkatan prasarana dan melanjutkan pembangunan fisik bangunan industri.

k.3. Kawasan Strategis Kota

Sesuai dengan RTRW kawasan strategis kota diarahkan ke Berohol dan Bajenis. Hingga akhir RPJMD-3 semestinya telah selesai dibuat Rencana Detail tata Ruang (RDTR) atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan telah dilakukan pembenahan prasarana dasar pada lokasi Berohol dan Bajenis. Pada RPJMD-4 dilakukan peningkatan prasarana dan penambahan berbagai fasilitas pada lokasi Berohol dan Bajenis.

## BAB V PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan nasional merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan Kota Tebing Tinggi 20 tahun ke depan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kota Tebing Tinggi tahun 2006-2025 diharapkan dapat memberikan nuansa, perencanaan, rekayasa, dan arsitektur pembangunan Kota sampai tahun 2025. Sebagai perencanaan yang lebih menekankan sifat-sifat strategis manajemen pembangunan kota, maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tebing Tinggi ini lebih difokuskan pada visi, misi dan arah pembangunan kota tahun 2006-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tebing Tinggi ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh stakeholder pembangunan kota, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota 20 tahun ke depan. Oleh karena itu, RPJP Daerah Kota Tebing Tinggi ini juga menjadi tuntunan arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Kota Tebing Tinggi tahun 2006-2010, dan Rencana Kerja Pemerintah Kota Tebing Tinggi (RKPD) setiap tahunnya. RPJP-D Kota Tebing Tinggi disusun dan ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi Kota Tebing Tinggi yang memerlukan prasyarat pokok ; (1) Komitmen, dukungan dan peran serta dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan kota, khususnya Pemerintah Kota-DPRD-Swasta-Masyarakat (2) Konsistensi implementasi perencanaan dan pelaksanaan; (3) Mengacu kepada kepentingan masyarakat dan masa depan; (4) Tersedianya sumber-sumber pembiayaan pembangunan kota.

**WALIKOTA TEBING TINGGI,**

ttd.

**UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Syaprin Efendi Harahap

